

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI  
INSTITUSIONAL**



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama: Aulia Utami

No. Mahasiswa: 16312283

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI  
INSTITUSIONAL**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Aulia Utami

No. Mahasiswa: 16312283

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Penulis



(Aulia Utami)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF TEORI INSTITUSIONAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

Nama: Aulia Utami

No. Mahasiswa: 16312283

**SKRIPSI INI TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN**

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

**Dosen Pembimbing**



**(Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA)**

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI  
INSTITUSIONAL**

Disusun Oleh : **AULIA UTAMI**

Nomor Mahasiswa : **16312283**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 08 September 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.



Penguji : Muqodim, Drs., M.B.A., Ak.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si. Ph.D.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamiin, sungguh hanya dengan kehendak dan ridho-Mu YaAllah, skripsi ini dapat terselesaikan. Laa hawla wa laa quwwata illa billah. Allahumma shalli'aala sayyidinaa Muhammad wa'ala aali sayyidinaa Muhammad. Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu mina zhazhaalimiin.*

*Saya bersyukur telah dipertemukannya saya dengan 2 wanita dan 3 laki-laki hebat yang tidak henti-hentinya mendoakan saya, selalu mendukung dalam kebaikan, rela mengorbankan waktu yang mungkin tidak akan terulang kembali, dan mengorbankan kesempatan umurnya sehingga saya dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmad dan ridho-Nya.*

*Terimakasih kepada semua dosen akuntansi atas ilmu yang InsyaAllah bermanfaat, dan kepada siapapun kalian yang mendo'akan segala kebaikan untuk saya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmad, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita. Aamiin.*

## MOTTO

*“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’: 135)*

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,” (QS. Ali-Imran: 190).*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh*

Alhamdulillahirobbil'aalamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Teori Institusional**”. Penyusunan skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat akademis untuk mencapai kelulusan jenjang Pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *Salallahu'alayhiwasalam* beserta keluarga, sahabat, dan pengikut yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat adanya bantuan dan bimbingan dari seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, petunjuk, melimpahkan rahmat, rizki dan hidayah-Nya hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.

2. Nabi Agung Muhammad beserta sahabat yang selalu menjadi teladan dalam perjalanan hidup.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Jaka Sriyana, SE., M. Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan inspirasi terbaiknya dalam membantu penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh sahabat dan kerabat yang telah memberikan banyak pengalaman dan motivasi baik dari cara berorganisasi, berkompetisi, dan bersosialisasi.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Segala kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini penulis terima dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

***Wassalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh***

Yogyakarta, 11 Agustus 2020



(Aulia Utami)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Motto.....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
Abstrak.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 <b>LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
1.2 <b>RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>7</b>
1.3 <b>TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>8</b>
1.4 <b>MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
1.5 <b>SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 <b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1.1    Teori Institusional .....	12
2.1.2    Laporan Keuangan.....	18
2.1.3    Kualitas Laporan Keuangan.....	21
2.1.4    Pendidikan Kepala Daerah.....	24
2.1.5    Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	25
2.1.6    Studi Banding .....	26
2.1.7    Tingkat Urbanisasi.....	26
2.1.8    Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	27
2.2 <b>PENELITIAN TERDAHULU.....</b>	<b>29</b>
2.3 <b>HIPOTESIS PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>

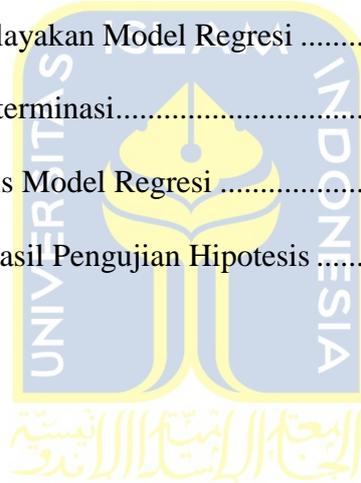
2.3.1	Pengaruh pendidikan kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .....	38
2.3.2	Pengaruh jumlah ASN terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .....	40
2.3.3	Pengaruh studi banding terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .....	41
2.3.4	Pengaruh tingkat urbanisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .....	42
2.3.5	Pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .....	43
2.4	KERANGKA PENELITIAN .....	44
BAB III METODE PENELITIAN .....		46
1.1	POPULASI DAN SAMPEL .....	46
1.2	VARIABEL PENELITIAN .....	48
3.2.1	Variabel Dependen .....	48
3.2.2	Variabel Independen .....	48
3.2.3	Variabel Kontrol .....	52
1.3	METODE PENGUMPULAN DATA .....	53
1.4	METODE ANALISIS DATA .....	54
3.4.1	Statistik Deskriptif .....	54
3.4.2	Menilai Keseluruhan Model ( <i>Overall Model Fit</i> ) .....	54
3.4.3	Menguji Kelayakan Model Regresi .....	55
3.4.4	Koefisien Determinasi .....	55
3.4.5	Analisis Regresi Logistik .....	56
3.4.6	Pengujian Hipotesis .....	57
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN .....		58
4.1	ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF .....	58
4.2	MENILAI KESELURUHAN MODEL ( <i>OVERALL MODEL FIT</i> ) .....	63
4.3	MENGUJI KELAYAKAN MODEL REGRESI .....	66
4.4	KOEFISIEN DETERMINASI .....	67
4.5	ANALISIS REGRESI LOGISTIK .....	68
4.6	PENGUJIAN HIPOTESIS .....	71

4.7	PEMBAHASAN .....	74
4.7.1	Pengaruh pendidikan kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .....	74
4.7.2	Pengaruh jumlah ASN terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .....	77
4.7.3	Pengaruh studi banding terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .....	79
4.7.4	Tingkat urbanisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .....	82
4.7.5	Pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .....	83
4.7.6	Pengaruh <i>intergovernmental revenue</i> terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .....	85
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....		87
5.1	SIMPULAN .....	87
5.2	KETERBATASAN .....	90
5.3	SARAN .....	91
DAFTAR REFERENSI .....		93



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3. 1 Skala Pendidikan Kepala Daerah .....	49
Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	58
Tabel 4. 2 Iteration History Block 0.....	64
Tabel 4. 3 Iteration History Block 1.....	65
Tabel 4. 4 Perbandingan Nilai $-2LL$ .....	65
Tabel 4. 5 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi .....	67
Tabel 4. 6 Hasil Uji Determinasi.....	68
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Model Regresi .....	68
Tabel 4. 8 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis .....	73



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Opini BPK
- Lampiran 2 : Data Pendidikan Kepala Daerah
- Lampiran 3 : Data Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Lampiran 4 : Data Studi Banding
- Lampiran 5 : Data Tingkat Urbanisasi
- Lampiran 6 : Data Jumlah Anggota DPRD
- Lampiran 7 : Data *Intergovernmental Revenue*
- Lampiran 8 : Hasil Uji dan Regresi



## ABSTRAK

Kualitas laporan keuangan masih menjadi masalah di Indonesia dilihat dari opini hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh BPK. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan perspektif teori institusional. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Sampel terdiri atas 100 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil analisis Pendidikan Kepala Daerah ( $X_1$ ), Jumlah ASN ( $X_2$ ), Studi Banding ( $X_3$ ), Tingkat Urbanisasi ( $X_4$ ), Jumlah Anggota DPRD ( $X_5$ ) sebagai variabel independen dan *Intergovernmental Revenue* ( $X_6$ ) sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** *Pendidikan Kepala Daerah, Jumlah PNS, Studi Banding, Tingkat Urbanisasi, Jumlah Anggota DPRD, Intergovernmental Revenue, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.*



*The quality of financial statements is still a problem in Indonesia, judging by the report's opinion on the financial statements of the local government provided by BPK. One of the efforts made to overcome this problem is to analyze factors that affect the quality of the local government's financial statements using the perspective of institutional theory. The research uses quantitative methods. Samples consist of 100 Local Regency/City governments in Indonesia in 2017 using a purposive sampling method. This research used multiple regression analyses using SPSS. Based on the results of the analysis of Regional Head education ( $X_1$ ), Total civil servants ( $X_2$ ), Comparative Study ( $X_3$ ), Urbanization rate ( $X_4$ ), number of DPRD members ( $X_5$ ) as independent variables and Intergovernmental Revenue ( $X_6$ ) as control variables had significant effects on the quality of the local government's financial statements.*

**Keywords:** *Regional Head Education, Total Civil Servants, Comparative Study, Urbanization Rate, Number of DPRD Members, Intergovernmental Revenue, Quality of The Local Government's Financial Statements.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi keuangan dan otonomi daerah dapat merubah iklim pelaksanaan pemerintah daerah dan dapat menuju pada bentuk tata kelola pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hidayah, 2017). Sebelum reformasi, urusan pemerintah sebagian besar ditangani oleh pemerintah pusat, maka adanya reformasi tersebut sebagian urusan rumah tangga pemerintah ditangani oleh pemerintah daerah (Waliyyani & Mahmud, 2015). Pemerintah daerah adalah pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar dapat mewujudkan *good governance* (Maulana & Handayani, 2015). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan suatu pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Kadarisman & Gemiharto, 2017).

Menurut Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam *concepts statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan

di pemerintah yang didasari oleh hak yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pelaksanaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan menggunakan sistem dan standar akuntansi pemerintah untuk dapat mencapai *good governance*. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada para *stakeholder* yang dilakukan dalam satu periode memiliki tujuan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tentang Keuangan Negara 2003 dan Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tentang Pemerintah Daerah 2015.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah digunakan oleh para *stakeholders* sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang ada di dalam LKPD harus sesuai dengan kebutuhan pemakai, informasi memiliki manfaat untuk mendukung pengambilan keputusan, dan dapat dipahami oleh para pemakai (Surastiani & Handayani, 2015). Informasi akuntansi dalam laporan keuangan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Agar dapat mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan negara atau daerah perlu penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang kompeten (Setyowati et al., 2016). Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tentang Keuangan Negara 2003 Pasal 32 ditegaskan bahwa sebagai

pemerintah daerah harus menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku badan legislatif. Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tugas untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Marhawai, 2015). Dalam pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2004 menyatakan bahwa lembaga legislatif dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan agar kualitas laporan keuangan semakin baik. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan mengenai informasi ataupun nilai dalam LKPD, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Muzahid, 2014).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya pemeriksa keuangan eksternal di Indonesia yang memiliki kewenangan besar untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan negara (Raba, 2017). Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2004 terdapat opini yang diberikan BPK, salah satunya yaitu; Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Syarat utama agar LKPD dapat memperoleh opini WTP dari BPK adalah keterbukaan dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang digunakan dan seluruh kekayaan yang dikuasai pemerintah atas daerah tersebut (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari, 2014). Keterbukaan dalam penyajian transaksi keuangan perlu didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid sehingga dapat dengan mudah ditelusuri dan diuji oleh BPK. Ketika opini WTP diberikan oleh BPK mengenai tingkat kewajaran dari penyajian LKPD artinya telah memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dalam rangka memperoleh opini WTP dari BPK pemerintah dapat studi banding dengan daerah yang mendapat opini WTP dari BPK karena mampu memberikan tambahan kemampuan dalam menghadapi perubahan maupun penyesuaian sistem kerja di masa mendatang (Wungow et al., 2016). Mengingat bahwa melalui studi banding pemerintah dapat memperbaiki sistem, peningkatan mutu, penentuan kebijakan baru, dan menambah wawasan mengenai laporan keuangan (Binus University Quality Management Center, 2014).

Selain itu setiap pengelola keuangan harus mempunyai pengetahuan mengenai laporan keuangan sehingga laporan yang disajikan terbebas dari salah saji yang material. Pendidikan adalah salah satu indikator sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang tinggi dapat membantu aparatur dalam menyelesaikan tugas, salah satunya yaitu dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan daerah sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu (Setyowati et al., 2016).

Faktor lain menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jumlah ASN menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah untuk membangun daerah tersebut. Semakin besar urusan suatu daerah maka semakin besar jumlah ASN untuk memberikan informasi dalam laporan keuangan. Tercapainya laporan keuangan yang baik tidak terlepas dari aturan dan ketentuan dari organisasi. Jumlah pegawai yang berukuran besar cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan, namun jumlah pegawai yang berukuran lebih besar umumnya dapat memberikan pelayanan publik yang lebih banyak karena jumlah penduduk yang besar.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tingkat urbanisasi. Meningkatnya populasi penduduk daerah perkotaan juga harus didukung oleh pemerintah dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan adanya pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Hal ini memberikan dampak pemerintah daerah di metropolitan cenderung memiliki tingkat kepatuhan laporan keuangan yang lebih tinggi. Akibatnya, wilayah urban menjadi magnet menarik bagi orang-orang yang memiliki edukasi tinggi. Oleh sebab itu, daerah perkotaan yang padat penduduk umumnya memiliki tuntutan agenda-agenda reformasi publik, sosial, dan ekonomi yang lebih tinggi dan progresif (Ratmono, 2013). Dengan demikian, urbanisasi merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) menggunakan *agency theory* dimana variabel *control Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan akan diganti menggunakan teori institusional dimana variabel *control Intergovernmental revenue* terhadap kualitas laporan keuangan. Keberhasilan suatu aturan dapat diketahui dengan menelusuri lebih jauh proses institusionalnya. Salah satu teori yang digunakan sebagai pengungkapan keberhasilan implementasi suatu aturan dalam sebuah organisasi sektor publik yaitu teori *New Institutional Sociology* (NIS) (Mariandini et al., 2018). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arifin et al (2015) menggunakan *institutional theory* dimana variabel *six of local government* sebagai *coercive isomorphism, jurisdiction (Java and non-Java)* sebagai *mimetic isomorphism*, dan *political influence* sebagai *normative isomorphism* terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam tulisan ini peneliti akan melakukan penelitian dengan variabel independen kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD ) yang dinilai menggunakan opini hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada beberapa pemerintah daerah/kota di Indonesia. Peneliti akan membahas faktor apa sajakah yang mempengaruhi kualitas LKPD. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota DPRD dan jumlah ASN sebagai pengujian teori *coercive isomorphism*. Variabel studi banding sebagai pengujian teori *mimetic isomorphism*. Variabel pendidikan kepala daerah dan tingkat urbanisasi dan sebagai pengujian teori *normative isomorphism*.

Konsep utama penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi logistik digunakan jika data variabel dependen (Y) adalah data nominal karena terdapat tingkatannya yaitu WTP adalah baik dan WDP adalah buruk sehingga metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik.

Uraian permasalahan diatas mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Teori Institusional.”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh studi banding terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh tingkat urbanisasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pendidikan kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

3. Mengetahui pengaruh studi banding terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh tingkat urbanisasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
6. Mengetahui pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang mungkin didapat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bidang Keilmuan

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, yang harapannya membantu untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan membantu penelitian selanjutnya untuk menjelaskan masalah ini dari latar belakang sains yang berbeda.

2. Manfaat Praktisi

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan guna membantu pemerintah mengenai hal yang dapat disosialisasikan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah agar tercapainya *good governance*.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan kajian teoritis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, menguraikan mengenai penelitian terdahulu yang telah ada yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, serta pengembangan model penelitian yang didasari dengan perumusan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan untuk menguji kebenaran pada penelitian.

### **BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan mengenai analisis data, pengujian dan penjelasan atas hipotesis yang telah dibuat, dan pembahasan dari hasil analisis yang dikaitkan dengan penelitian terdahulu.

## BAB V    SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat rumusan hasil penelitian yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 LANDASAN TEORI

##### 2.1.1 Teori Institusional

Berkenaan dengan studi organisasi, banyak peneliti menggunakan salah satu teori yang sering digunakan sebagai konsep dasar penelitian yaitu teori institusional (*institutional theory*) (Sofyani & Akbar, 2013). Dalam teori institusional, institusi di luar organisasi mempengaruhi perilaku organisasi atau keputusan yang diambil oleh organisasi. Menurut DiMaggio dan Powell (2013) bahwa adanya tekanan dari luar jika ingin bertahan hidup organisasi berupaya untuk menyesuaikan diri atau *isomorphism*, *isomorphism* merupakan suatu proses mendorong satu unit dalam suatu populasi yang menyerupai unit lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Teori institusional memaknai bahwa keberadaan organisasi dipengaruhi oleh tekanan normatif yang timbul dari sumber eksternal ataupun internal (Sofyani & Akbar, 2013). Teori institusional biasanya digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi publik (Villadsen, 2011).

Teori institusional menjelaskan bahwa organisasi yang memprioritaskan legitimasi akan cenderung untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial

dimana organisasi tersebut berada. Akibat penyesuaian pada harapan eksternal atau harapan sosial menimbulkan kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal mereka dan fokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal. Organisasi publik yang condong untuk memperoleh legitimasi bisa jadi memiliki kesamaan atau *isomorphism* dengan berbagai organisasi publik lainnya.

Teori institusional memprediksi jika organisasi dapat menjadi serupa dikarenakan tekanan institusional, tekanan akan menimbulkan tiga perubahan atau upaya yang akan dilakukan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pertama, *coercive isomorphism* yaitu proses penyesuaian menuju kesamaan dengan “pemaksaan” melalui dari *stakeholder* yang *powerfull* sehingga organisasi yang merespon memiliki ketergantungan yang besar. Contohnya, tekanan datang karena peraturan pemerintah memiliki sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Kedua, *mimetic isomorphism* yaitu proses meniru organisasi lain yang berhasil dalam satu bidang, bukan karena adanya dorongan akan tetapi terjadi ketika tujuan yang ambigu atau terdapat ketidakpastian lingkungan yang simbiotik (Wijaya & Akbar, 2013). Oleh karena itu organisasi akan cenderung menjadikan diri mereka sebagai model yang sama dengan organisasi lain dan mendorong organisasi untuk melakukan imitasi (Sofyani & Akbar, 2013). Menurut DiMaggio dan Powell (2013) biasanya proses meniru organisasi lain muncul di lingkungan yang tidak pasti. Misalnya,

manajemen perusahaan Korea banyak ditiru oleh perusahaan negara lain karena dianggap berhasil. Ketiga, *normative isomorphism* yaitu melalui peran dari suatu kelompok yang sering diasosiasikan dengan profesionalisasi yang memperjuangkan praktek adopsi yang seharusnya dilakukan.

#### **2.1.1.1 *Coercive Isomorphism***

Berdasarkan perspektif teori institusional, banyaknya jumlah anggota DPRD menyebabkan suatu organisasi melakukan *coercive isomorphism* dalam rangka memenuhi tekanan dari luar organisasi agar memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam perspektif teori institusional, *coercive isomorphism* adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain untuk mengubah sistem sehingga menyebabkan timbulnya pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Arifin et al (2015) menyatakan bahwa terdapat potensi tekanan yang besar dari anggota parlemen sebagai pengaruh paksaan dari DPRD untuk membuat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) juga sebagai *coercive isomorphism* karena pemerintah daerah dengan jumlah ASN yang lebih banyak akan dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP daripada pemerintah

daerah yang memiliki jumlah ASN lebih sedikit. Jumlah ASN dianalogikan sebagai segmen bisnis dalam perusahaan sehingga semakin banyak segmen bisnis, semakin banyak hal yang harus diungkapkan dalam memenuhi apa saja yang dibutuhkan agar laporan keuangan sesuai dengan kaidah yang berlaku seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

#### **2.1.1.2 *Mimetic Isomorphism***

Menurut teori institusional, studi banding sebagai *mimetic isomorphism* karena adanya studi banding pegawai dapat meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia dan juga diharapkan dapat memelihara kemampuan serta kompetensi sehingga yang melaksanakan studi banding dapat meniru ilmu yang didapatkannya agar memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah. Perubahan yang didapatkan pemerintah daerah yang telah mengikuti studi banding disebut sebagai pengimitasian atau *mimetic isomorphism* agar pemerintah daerah tersebut menjadi pemerintah daerah yang baik. Studi banding yang dilakukan pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **2.1.1.3 *Normative Isomorphism***

Tingkat urbanisasi sebagai *normative isomorphism* karena dengan mendasarkan pada teori institusional bahwa tuntutan akan *normative isomorphism* seperti kualitas laporan keuangan

akan lebih besar bagi pemerintah daerah dengan tingkat urbanisasi lebih tinggi (Ratmono, 2013). Daerah urban dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dan penduduk yang lebih teredukasi akan berbeda dengan daerah nonurban. Oleh karena itu, melalui pendidikan formal dan sosialisasi pengetahuan formal pada bidang tertentu dapat menunjang dan menyebarkan kepercayaan normatif itu.

Pendidikan kepala daerah juga sebagai *normative isomorphism* karena tuntutan akan *normative isomorphism* akan lebih besar bagi kepala daerah yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Muzahid (2014) menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika profesionalisme meningkat, tekanan normatif juga meningkat (Wijaya & Danar, 2014).

#### **2.1.1.4 Intergovernmental Revenue**

*Intergovernmental revenue* atau tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat adalah besarnya jenis pendapatan pemerintah daerah yang didapat dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemerintah daerah dan dana yang diberi pemerintah pusat biasanya diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan (Girsang & Yuyetta, 2015). Menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, untuk pelaksanaan desentralisasi, daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang sifatnya transfer dengan berprinsip *money follows function*.

Menurut Marhawai (2015) bahwa dana perimbangan merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat akan menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan yang cukup lengkap dengan informasi pendukung sebagai dasar untuk memonitor kinerja pemerintah daerah atas penggunaan dana transfer (Hidayah, 2017). Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat membuat pemerintah daerah mentaati peraturan yang berlaku (Pratiwi & Aryani, 2016). Pemerintah daerah didorong untuk dapat meningkatkan transparansi dana yang telah diterimanya dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat dan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan (Maulana & Handayani, 2015) dan (Najah & Purwati, 2019). Dalam penelitian ini *intergovernmental revenue* diukur menggunakan total dana perimbangan dibagi total pendapatan.

## 2.1.2 Laporan Keuangan

### 1. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan informasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu entitas (Pradono & Basukianto, 2015). Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Marhawai, 2015). Suatu cerminan dari baik ataupun buruknya penilaian terhadap suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari laporan keuangan daerah (Yenni, 2017). Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan siklus akuntansi yaitu dari tahap pengidentifikasian dokumen, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar pada masing-masing akun (Pradono & Basukianto, 2015). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yaitu berupa laporan keuangan.

### 2. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode pelaporan, yang mana memberi gambaran perbandingan antara anggaran dengan realisasinya.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan ringkasan pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, oleh karena itu entitas pelaporan harus menyajikan unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang mencatat posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas, yaitu pelaporan beban dan *surplus* atau defisit.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional, aset non keuangan, pembiayaan, dan

transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan pada tahun sebelumnya.

#### 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang menjelaskan rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Masing-masing akun transaksi dalam laporan keuangan harus saling berhubungan antara akun satu dengan akun yang lainnya.

Demi terbentuknya pemerintah yang baik maka kualitas laporan keuangan sangat diperlukan. Kualitas pemerintah daerah sangat mempengaruhi laporan keuangan dimana hasil dari laporan keuangan yang dibuat akan digunakan dengan baik dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yaitu pendidikan kepala daerah, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), studi banding, tingkat urbanisasi, jumlah anggota DPRD, dan *intergovernmental revenue*.

#### 3. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan gambaran informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dalam satu periode, sebagai gambaran dari kinerja entitas yang bersangkutan dan memberikan manfaat untuk para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya (Pradono & Basukianto, 2015). Laporan keuangan sebagai tujuan umum adalah memberi informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan. Laporan keuangan bagi pihak eksternal dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan bagi pihak internal dapat digunakan sebagai penilaian kinerja.

#### 4. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

Pimpinan entitas sebagai penanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

### 2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan agar dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus memiliki nilai informasi yang berkualitas dan sangat berguna untuk pengambilan keputusan (Safrida et al., 2010). Laporan keuangan yang berkualitas artinya bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam mengelola organisasi (Setyowati et al., 2016).

Kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan opini BPK. Pemberian opini oleh BPK RI atas laporan keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN). Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2004 menjelaskan bahwa opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria; sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pemberian opini yang dilakukan oleh BPK juga harus mempertimbangkan tingkat kesesuaian, cukup dalam pengungkapan laporan keuangan dikaitkan dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pada tahun sebelumnya (Wibowo, 2019).

Kualitas laporan keuangan yang diukur menggunakan opini BPK, menurut teori institusional dapat dipandang sebagai suatu praktek yang dapat diterima secara sosial dalam rangka memperoleh legitimasi dari konteks institusional mereka (Ratmono, 2013). Opini BPK yang diperoleh pemerintah daerah dalam rangka memperoleh legitimasi dari masyarakat, pemerintah pusat atau organisasi-organisasi lainnya bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan

dan komitmen yang baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2017) opini audit atas laporan keuangan terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan dengan tingkat kewajaran atas laporan keuangan, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*.

Menurut Munawar et al (2016) opini WTP atau *unqualified opinion* diberikan ketika laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion* diberikan ketika penyajian laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum namun terdapat beberapa hal yang dikecualikan (Wibowo, 2019).

Kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh pada akuntabilitas karena dengan kualitas laporan keuangan yang baik maka akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang telah dibuat (Setyowati et al., 2016)

#### 2.1.4 Pendidikan Kepala Daerah

Seseorang dengan latar belakang pendidikan formal memiliki banyak informasi dan lebih kompleks karena tingkat pendidikan dapat mencerminkan bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan dan *skill* (Pratiwi & Aryani, 2016). Pendidikan adalah proses pembelajaran untuk menghimpun dan meningkatkan pengetahuan. Pendidikan di bidang tertentu (spesialisasi) akan meningkatkan pengetahuan pada bidang yang berkenaan (Murina & Rahmawaty, 2017). Melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan menjadikan pendidikan merupakan bagian dari pengembangan kompetensi dan pengembangan karier kepala daerah (Jaenudin & Chairunisa, 2015). Kualitas seseorang akan meningkat dengan pendidikan yang dimilikinya.

Posisi sentral dan strategis dalam sistem pemerintah daerah yaitu kepala daerah. Sebagai pemimpin, kepala daerah adalah seseorang yang bergerak untuk mengarahkan pikiran dan pendapat anggota organisasi, membimbing, menetapkan tujuan organisasi, memotivasi anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi, mempengaruhi, dan melakukan pengawasan anggota kelompok yang dipimpinnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tentang Pemerintah Daerah 2004, menyatakan bahwa kepala daerah merupakan pimpinan daerah yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Seseorang yang

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih rasional dalam berpikir dan bertindak serta dalam memahami tugas dan tanggung jawab yang dibebankan dengan baik (Murina & Rahmawaty, 2017).

### **2.1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2010, dimana yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan adalah pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah merupakan salah satu entitas pelaporan yang merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi. Dari definisi tersebut, entitas akuntansi adalah ASN.

Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan penyelenggara pemerintah daerah sekaligus pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah dan kemudian melimpahkan kekuasaannya untuk dapat dilakukan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pejabat pengguna anggaran atau barang di bawah koordinasi sekretaris daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi/kota/kabupaten pembuatannya dilakukan dari masing-masing OPD.

Menurut Girsang & Yuyetta (2015) pada struktur pemerintahan di Indonesia ASN merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang diterjadi di lingkungan pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah PNS yang dimiliki artinya

semakin kompleks pemerintah tersebut, sehingga semakin banyak hal yang harus diungkapkan dalam memenuhi apa saja yang dibutuhkan agar laporan keuangan sesuai dengan kaidah yang berlaku seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

#### **2.1.6 Studi Banding**

Studi banding adalah proses penggalan ilmu khusus di lokasi dan tempat yang berbeda agar dapat diterapkan dan dikembangkan di tempat sendiri. Studi banding merupakan bagian dari pengembangan kompetensi dan pengembangan karier pegawai melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan (Jaenudin & Chairunisa, 2015). Studi banding adalah proses pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau perusahaan, dimana didalamnya terdapat proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam jangka pendek, bertujuan untuk meningkatkan wawasan, sikap dan keterampilan, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan pengetahuan yang akan diterapkan kedepannya agar menjadi lebih baik (Muzahid, 2014). Kegiatan tersebut tentunya sangat baik untuk perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya.

#### **2.1.7 Tingkat Urbanisasi**

Urbanisasi diartikan secara populer sebagai perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Beberapa studi dan data memperlihatkan bahwa semakin maju tingkat perekonomian suatu negara maka semakin tinggi tingkat urbanisasi (P. Adam, 2010). Jadi

urbanisasi adalah fenomena alamiah sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk di negara tersebut. Namun, sesungguhnya pengertian urbanisasi adalah proses perubahan kehidupan dan tempat bagi terwujudnya masyarakat dan bentuk perkotaan (*urban*) (Soetomo, 2013).

Menurut P.Adam (2010) urbanisasi tidak semata-mata hanya fenomena kependudukan melainkan lebih daripada itu seperti dipandang sebagai fenomena politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Terdapat kecenderungan pada beberapa kota besar akan semakin tumbuh dan berkembang, kemudian membentuk kota-kota yang disebut dengan kota metropolitan. Urbanisasi dan faktor ekonomi akan dapat mendorong perubahan pada segala aspek seperti kependudukan, politik, budaya, sosial, teknologi, sumber daya lingkungan, dan hasil-hasil sejarah (Soetomo, 2013). Perkembangan kota dan urbanisasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di daerah tersebut, semakin maju tingkat perekonomian suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat urbanisasi dan dimana perkembangan ekonomi akan mencerminkan kualitas laporan keuangan (P. Adam, 2010).

#### **2.1.8 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai penyelenggara program pemerintah daerah adalah DPRD. Anggota

DPRD dipilih berdasarkan pemilihan umum yang terdiri dari berbagai anggota partai politik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri dari tiga wilayah administratif yaitu DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota. Anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit berjumlah 20 orang dan paling banyak berjumlah 45 orang.

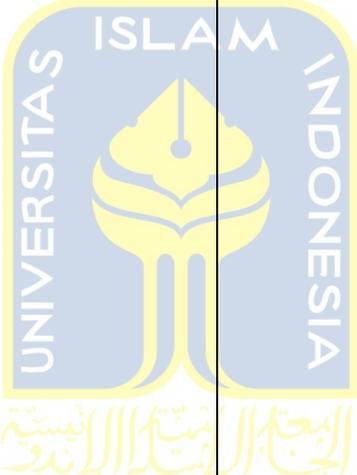
Faktor penting dalam meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah adalah pengawasan dan pemeriksaan. Lembaga legislatif yang melakukan pengawasan yaitu DPRD. Menurut Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyatakan bahwa sebagai wakil masyarakat, DPRD memiliki fungsi pengawasan yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar sejalan dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah agar bisa menciptakan suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2004, menyatakan bahwa DPRD dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan agar semakin baik kualitas laporan keuangan.

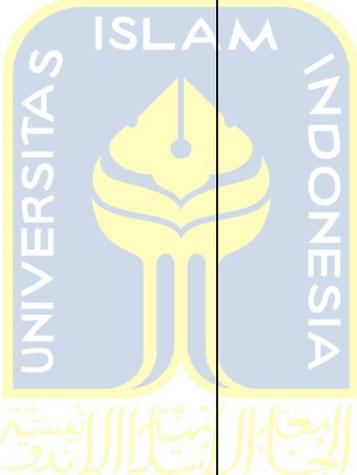
## 2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

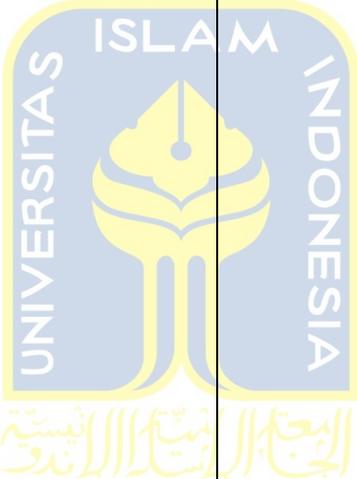
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Setyaningrum & Syafitri, 2012)	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	Ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, ukuran administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah, dan <i>intergovernmental revenue</i> .	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD karena semakin banyak jumlah anggota DPRD dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat pengungkapan wajib LKPD, begitu juga dengan umur administratif, dan kekayaan pemerintah

			<p>daerah. Mengenai pengujian <i>intergovernmental revenue</i> menunjukkan pengaruh negatif terhadap pengungkapan wajib LKPD karena pemerintah pusat kurang dalam memberikan kontrol terhadap penggunaan dana perimbangan sehingga tidak muncul dorongan untuk meningkatkan pengungkapan dalam LKPD. Berdasarkan variabel yang lain seperti ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio</p>
--	--	--	--

				kemandirian keuangan daerah, dan pembiayaan utang dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.
2	(Rafida, Ridwan, Abdullah, & Yamin, 2019)	Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> , Kekayaan Pemerintah Daerah dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah)	<i>Intergovernmental revenue</i> , kekayaan pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah.	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara <i>intergovernmental revenue</i> dengan tingkat LKPD. Kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD karena tingkat kebergantungan daerah terhadap dana transfer yang didapat dari pemerintah pusat masih tergolong

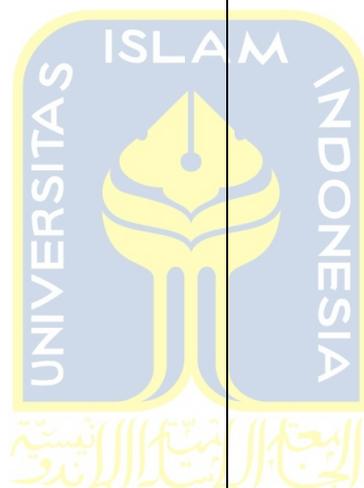
			<p>tinggi dan pengelolaan PAD masih tergolong rendah sehingga tidak membuat pemerintah daerah meningkatkan pengungkapan LKPD, tingginya tingkat kebergantungan daerah atas dana transfer tidak membuat pemerintah daerah meningkatkan LKPD karena pemerintah pusat tidak menekan dan melakukan kontrol khusus terhadap penggunaan dana transfer. Begitu juga umur administrasi pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan</p>
--	--	--	--

				LKPD karena pemerintah daerah yang memiliki pengalaman lama maupun pengalaman baru dalam penyusunan laporan keuangan tidak berdampak pada tingginya tingkat pengungkapan LKPD.
3	(Sari & Tamrin, 2016)	Pengaruh Penerapan <i>Good Government Governance</i> dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri)	<i>Good government governance</i> dan kompetensi sumber daya manusia.	Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka kesimpulan yaitu penerapan <i>good government governance</i> dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan

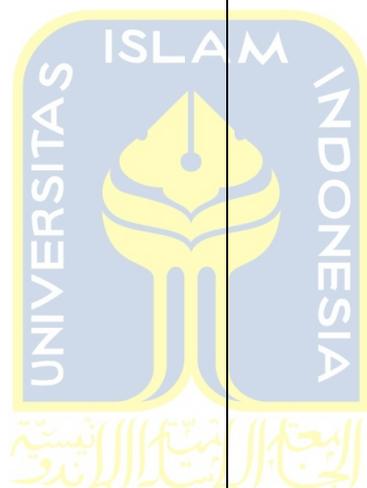
			<p>Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. Dimana menghasilkan suatu lapoan keuangan yang berkualitas yaitu mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku suatu pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya juga harus menerapkan prinsip-prinsip <i>good government governance</i> sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu peran SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan</p>
--	--	--	---

				<p>pelaksanaan pekerjaan, dimana SDM yang kompeten merupakan salah satu aset penting bagi lembaga untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Kedua variabel ini, memberikan kontribusi yang sangat besar untuk menciptakan informasi laporan keuangan yang berkualitas.</p>
4	(Muzahid, 2014)	<p>Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja</p>	<p>Tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau menyeluruh bahwa tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja pegawai</p>

		Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara		berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sedangkan secara parsial bahwa tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
5	(Ratmono, 2013)	Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Instiusional dan	Ukuran pemerintah daerah, hutang pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, urbanisasi pemerintah daerah,	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah semakin tinggi ketersediaan



		Keagenan	ketergantungan finansial, jenis opini BPK, dan belanja pemerintah daerah.	<i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) maka ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif sehingga tidak didukung bukti empiris. Variabel hutang pemerintah daerah menunjukkan tidak didukung bukti empiris. Kekayaan Pemda, urbanisasi Pemda, ketergantungan finansial, jenis opini BPK, dan belanja Pemda menunjukkan tidak bernilai signifikan sehingga hipotesis tersebut tidak didukung.
6	(Oktarina, Raharjo, & Andini, 2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas	Penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan penerapan	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan



		Aparatur Pemerintah Daerah dan <i>Good Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014).	<i>good governance.</i>	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas aparatur pemerintah daerah dan penerapan <i>good governance</i> berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
--	--	--	-------------------------	---

## 2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

### 2.3.1 Pengaruh pendidikan kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pendidikan adalah proses berubahnya sikap dan tata laku seseorang atau kelompok sebagai usaha untuk mendewasakan seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Muzahid, 2014). Pendidikan dapat menumbuhkan kemampuan pengetahuan dan meningkatkan kualitas seseorang karena orang yang berpendidikan dalam berfikir dan bertindak akan lebih rasional, serta dapat mengerti dengan benar mengenai tugas dan tanggung jawab yang dibebankan

kepadanya (Murina & Rahmawaty, 2017). Pegawai yang memiliki pengetahuan baik seharusnya dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Desipradani & Nuraini, 2018). Dalam penyelesaian sebuah pekerjaan, latar belakang dan jenjang pendidikan merupakan faktor penting.

Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah dimana kepala daerah dituntut untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Secara logika, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang mempunyai latar belakang tingkat pendidikan di bidang ekonomi atau akuntansi akan lebih mudah dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintah untuk penyajian laporan keuangan.

Tingginya tingkat pendidikan akuntansi menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang dalam menyusun laporan keuangan, maka dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang dapat lebih mudah melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan yang baik (Nazaruddin et al., 2014). Tingkat pendidikan akuntansi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja pegawai, dimana ketika kinerja pegawai meningkat maka dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik, hal ini sesuai dengan penelitian (Jaenudin & Chairunisa, 2015). Dalam penelitian yang dilakukan Muzahid (2014) menyatakan bahwa tingkat

pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

*H<sub>1</sub> = Pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.*

### **2.3.2 Pengaruh jumlah ASN terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2005 menyatakan bahwa SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah yang diberi tugas untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah terutama wewenang atas pengguna anggaran atau barang daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah entitas akuntansi yang diberi kewajiban untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah dan menyajikan laporan keuangan (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Pemerintah daerah yang memiliki tingkat diferensiasi fungsional yang lebih tinggi cenderung untuk mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) 34 dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki tingkat diferensiasi fungsional rendah, diferensiasi fungsional atau perbedaan sub unit pada pemerintah daerah di Indonesia dikenal dengan nama ASN (Suparno

& Nanda, 2016). Jumlah ASN menggambarkan jumlah urusan yang dijadikan prioritas pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, dimana semakin banyak urusan pemerintah maka semakin kompleks pemerintah tersebut, semakin kompleks suatu pemerintahan diartikan semakin banyak jumlah ASN, dimana semakin banyak jumlah ASN maka semakin banyak informasi yang diungkapkan sebagai cara mengurangi asimetri informasi dan sebagai cara untuk menunjukkan kinerja yang semakin baik (Khasanah & Rahardjo, 2014). Selain itu banyaknya jumlah ASN mengakibatkan pemenuhan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah semakin tinggi dan berakibat terhadap kualitas laporan keuangan karena semakin banyak hal yang harus diungkapkan dalam memenuhi apa saja yang dibutuhkan agar laporan keuangan sesuai dengan kaidah yang berlaku seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Adanya pengaruh antara jumlah ASN terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal tersebut sesuai dengan penelitian (Pradono & Basukianto, 2015). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

*H<sub>2</sub> = Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.*

### **2.3.3 Pengaruh studi banding terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam suatu OPD menjadikan tercapainya laporan keuangan yang baik. Dimana salah satu cara yang dapat mempengaruhi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah studi banding. Tujuan dilakukannya studi banding adalah untuk menggali informasi, menambah wawasan mengenai pemerintah daerah lain, membandingkan kinerja pemerintah daerah lain yang memiliki kualitas laporan keuangan yang baik, mentransfer pengetahuan atas tercapainya opini WTP dari BPK atas laporan keuangannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Jaenudin dan Chairunisa (2015) mengatakan bahwa dengan adanya studi banding dapat meningkatkan kinerja pegawai, dimana ketika kinerja pegawai baik maka dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik juga. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

*H<sub>3</sub> = Studi banding berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.*

#### **2.3.4 Pengaruh tingkat urbanisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Daerah urban memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi, terdapat anggota legislatif dan memiliki penduduk yang lebih tereduksi dibandingkan dengan daerah nonurban, maka dari itu daerah perkotaan memiliki tuntutan agenda-agenda reformasi politik, sosial, dan ekonomi yang lebih tinggi dan progresif (Ratmono, 2013).

Mendasarkan pada teori institusional dapat diajukan argumentasi bahwa tuntutan akan *normative isomorphism* seperti kualitas laporan keuangan akan lebih baik bagi pemerintah daerah yang memiliki tingkat urbanisasi lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

*H<sub>4</sub> = Tingkat urbanisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.*

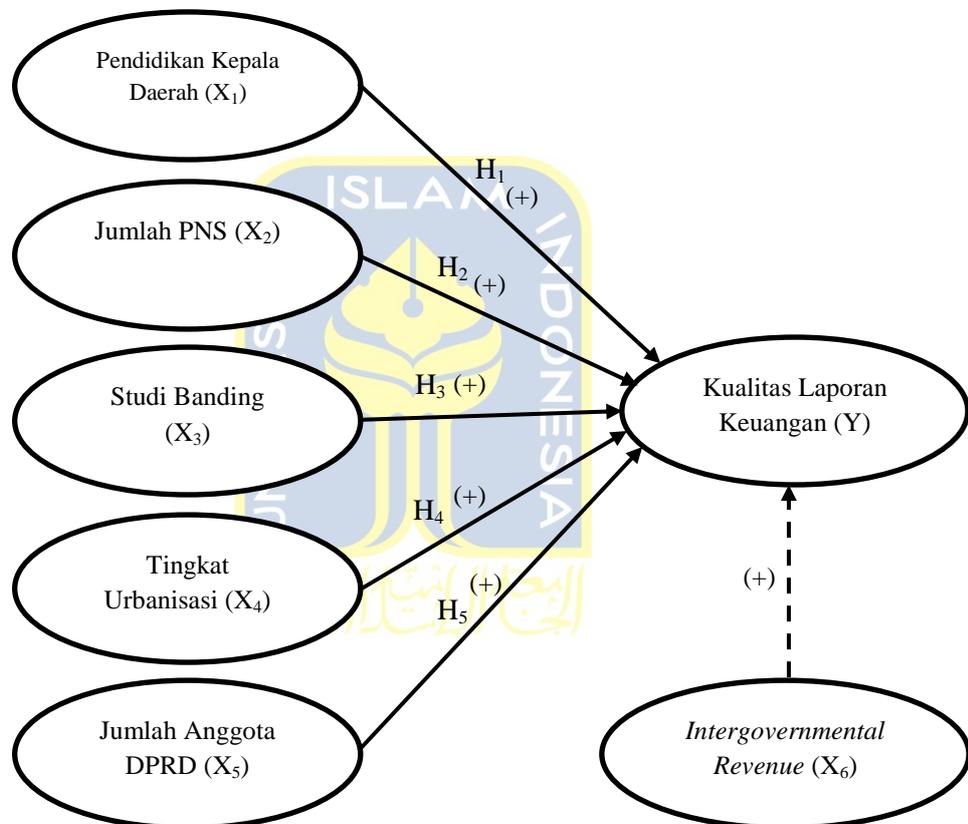
### **2.3.5 Pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran sebagai badan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai wakil rakyat DPRD memiliki fungsi pengawasan yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar sejalan dengan aspirasi masyarakat dan fungsi lainnya yaitu untuk mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah agar pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat terwujud dengan cara semakin banyak anggota DPRD yang memberikan pengawasan, tanggapan, dan dorongan terhadap pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik (Maulana & Handayani, 2015). Hal ini sesuai dengan penelitian (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Dengan demikian semakin banyak jumlah anggota

DPRD dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

*H<sub>5</sub> = Jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.*

## 2.4 KERANGKA PENELITIAN



Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan dikembangkan kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual merupakan suatu model yang terintegrasi mengenai pola hubungan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan kerangka proses berpikir. Gambar

diatas menunjukkan kerangka penelitian yang tersusun berdasarkan variabel yang akan digunakan sebagai penelitian ini, faktor-faktor tersebut antara lain pendidikan kepala daerah, jumlah PNS, studi banding, tingkat urbanisasi, dan jumlah anggota DPRD sebagai variabel independen. *Intergovernmental revenue* sebagai variabel kontrol dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah yang akan diteliti oleh peneliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempengaruhi karakteristik dan kuantitatif tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Hamta, 2015). Pendapat tersebut menjadikan penulis sebagai acuan untuk menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yaitu 100 kabupaten/kota pada tahun anggaran 2017 yang sudah diaudit oleh BPK RI dan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Sampel berasal dari kata dalam bahasa Inggris *sample* yang diindonesiakan “sampel” dan diartikan sebagai contoh, yaitu merupakan bagian yang diambil dari populasi (Benu & Benu, 2019). Definisi sampel menurut Santoso (2014) yaitu sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan dari pertimbangan subjek peneliti, dimana memiliki tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan (Hidayah, 2017). Kriteria-kriteria pemerintah

daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki *website* resmi untuk sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota pada tahun anggaran 2017
2. *Website* resmi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki data:
  - a. Terdapat hasil audit berupa opini BPK terhadap LKPD
  - b. Terdapat data latar belakang atau profil kepala daerah tahun anggaran 2017
  - c. Terdapat data jumlah PNS sebagai entitas akuntansi tahun anggaran 2017 pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian internal
  - d. Terdapat data tingkat urbanisasi yang diukur dengan kepadatan populasi per km<sup>2</sup>
  - e. Terdapat data jumlah anggota DPRD tahun anggaran 2017 pada Daerah Dalam Angka (DDA) masing-masing pemerintah daerah atau pada situs resmi pemerintah daerah

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mencocokkan dan mengambil data yang telah ditentukan melalui *website* resmi pada masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, melalui <https://www.bpk.go.id/ihps> dan [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) kemudian diolah menggunakan SPSS 21.

## 1.2 VARIABEL PENELITIAN

### 3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena terdapat variabel bebas atau independen (Benu & Benu, 2019). Tujuan peneliti yaitu memahami dan membuat variabel terikat kemudian menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya (Hamta, 2015). Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, pengukuran variabel kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia ditunjukkan dengan point 1 jika pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan opini WTP (baik) dan point 0 jika pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan opini WDP (tidak baik).

### 3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau dapat menjadi sebab adanya perubahan atau timbul dari variabel terikat secara positif atau negatif (Hamta, 2015). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendidikan kepala daerah, jumlah PNS, studi banding, tingkat urbanisasi, dan jumlah anggota DPRD. Pengukuran pada masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

#### 3.2.2.1 Pendidikan Kepala Daerah

Pendidikan merupakan hal penting untuk kehidupan manusia karena melalui pendidikan seseorang dapat

meningkatkan potensinya sehingga dapat mewujudkan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Seseorang yang semakin tinggi menempuh pendidikan maka semakin kompleks pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki orang tersebut. Pendidikan untuk bidang tertentu dapat meningkatkan pengetahuan pada bidang berkenaan (Murina & Rahmawaty, 2017). Indikator atau elemen yang akan digunakan dalam tingkat pendidikan kepala daerah adalah pendidikan formal, dimana tingkat pendidikan diukur dengan pendidikan terakhir kepala daerah.

Tabel 3.1 Skala Pendidikan Kepala Daerah

Pendidikan Terakhir	Skala
SMA	1
Strata 1	2
Strata 2	3
Strata 3	4

$$\text{PENDIDIKAN} = (\text{Pendidikan Kepala Daerah})$$

### 3.2.2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengambilan data untuk jumlah ASN melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Dimana jumlah ASN diprosikan dengan logaritma natural (Ln) dari jumlah ASN. Hal tersebut dilakukan

karena jumlah ASN setiap pemerintah daerah berbeda bahkan memiliki selisih yang besar, maka dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. *Website* BPS menyediakan data jumlah ASN pada tiap daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 2010 menyatakan bahwa, bahwa ASN atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebuah entitas akuntansi, yaitu unit pada pemerintahan yang memiliki tugas untuk mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

ASN = LN (Jumlah Aparatur Sipil Negara)

### 3.2.2.3 Studi Banding

Studi banding adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu sebagai bantuan untuk mencapai tujuan organisasi. Studi banding menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini (Murina & Rahmawaty, 2017). Studi banding lebih ditekankan untuk meningkatkan kemampuan melakukan pekerjaan yang lebih spesifik (Muzahid, 2014). Elemen data atau indikator yang akan digunakan untuk studi banding adalah studi banding yang diikuti.

Pengukuran variabel studi banding adalah point 1 jika pemerintah daerah mengikuti studi banding dan point 0 jika pemerintah daerah tidak melakukan studi banding.

#### 3.2.2.4 Tingkat Urbanisasi

Urbanisasi secara umum didefinisikan sebagai perpindahan penduduk desa ke kota. Dimana tingkat urbanisasi diproksikan dengan logaritma natural (Ln) dari kepadatan penduduk per km<sup>2</sup>. Hal tersebut dilakukan karena kepadatan penduduk setiap pemerintah daerah berbeda bahkan memiliki selisih yang besar, maka dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Penyebab urbanisasi ada dua faktor utama yaitu faktor pendorong (*push factor*) dari daerah asal dan faktor penarik (*pull factor*) dari daerah tujuan. Urbanisasi mengalami perubahan yang lebih luas, tidak hanya mengenai perpindahan secara fisik akan tetapi urbanisasi merupakan konsep multidimensional.

$$\text{URBANISASI} = \text{LN (Kepadatan Populasi per Km}^2\text{)}$$

#### 3.2.2.5 Jumlah Anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang digunakan dalam penelitian ini dijadikan sebagai proksi dalam mengukur ukuran legislatif. Dimana jumlah anggota DPRD diproksikan dengan logaritma natural (Ln) dari jumlah anggota DPRD. Hal tersebut dilakukan karena jumlah anggota DPRD setiap pemerintah daerah berbeda

bahkan memiliki selisih yang besar, maka dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Terkait dalam pengelolaan keuangan daerah, menurut pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2004 menjelaskan bahwa lembaga legislatif dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan agar kualitas laporan keuangan semakin baik. Jumlah anggota DPRD yang semakin banyak diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Hal ini senada dengan penelitian Maulana dan Handayani (2015) dan Marhawai (2015) yang menggunakan jumlah anggota DPRD.

$$\text{DPRD} = \text{LN (Jumlah anggota DPRD)}$$

### 3.2.3 Variabel Kontrol

#### 3.2.3.1 *Intergovernmental Revenue*

*Intergovernmental revenue* merupakan jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk pembiayaan

operasi pemerintah daerah. Rumus yang digunakan penulis untuk penelitian ini dengan membandingkan total pendapatan untuk mengukur *intergovernmental revenue* (Widodo, 2011):

$$IGROV = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

### 1.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan cara dokumentasi atau sering disebut dengan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber data seperti literatur, artikel, jurnal, dan situs di internet yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Anshari, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 yang diperoleh dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini BPK terhadap LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia, dimana menggunakan data yang diambil diakses melalui *website* resmi milik pemerintah daerah tersebut atau <https://www.bpk.go.id/ihps>. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan kepala daerah, jumlah PNS, studi banding, tingkat urbanisasi, dan jumlah anggota DPRD, dimana menggunakan data yang diambil melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan *website* resmi pemerintah daerah tersebut.

## 1.4 METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam metode ini pengujian yang digunakan antara lain:

### 3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan jumlah data (Santoso, 2014). Mean dapat digunakan sebagai perkiraan berapa besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat gambaran secara keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan telah memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Standar deviasi dapat digunakan sebagai penentu jenis data yang sering terjadi dalam penelitian. Dari hasil analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengetahui kondisi variabel penelitian, apakah dalam kondisi baik atau tinggi, cukup atau sedang, dan buruk atau rendah (Widodo, 2017).

### 3.4.2 Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengujian regresi logistik adalah menilai model fit (*overall model fit*). Hipotesis untuk menilai model fit ini adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

$H_1$ : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Dari hipotesis tersebut jelas bahwa tidak akan menolak hipotesis nol agar model fit dengan data. Statistik yang digunakan dalam model ini berdasarkan pada fungsi *likelihood*. *Likelihood*  $L$  dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif,  $L$  ditransformasikan menjadi  $-2\text{Log}L$ . Penurunan *likelihood* ( $-2\text{Log}L$ ) menunjukkan model regresi yang lebih baik atau model fit dengan data.

#### 3.4.3 Menguji Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi pada penelitian ini dinilai menggunakan *hosmer and lemeshow's goodness of fit test*. Jika nilai statistik *hosmer and lemeshow goodness of fit* sama dengan atau kurang dari 0.05 maka hipotesis nol ditolak, yang artinya terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik *hosmer and lemeshow goodness of fit* lebih besar daripada 0.05 hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

#### 3.4.4 Koefisien Determinasi

*Cox* dan *Snell's R Square* merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran pada regresi berganda pada teknik estimasi *likelihood*. *Cox* dan *Snell's R Square* memiliki kelemahan yaitu nilai maksimum

kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan. *Nagelkerke R Square* memodifikasi koefisien *cox* dan *snell's* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *cox* dan *snell's* pada regresi berganda. Nilai yang kecil atau mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

#### 3.4.5 Analisis Regresi Logistik

Pengujian seluruh hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik (*logistic regression*). Analisis regresi logistik digunakan pada penelitian ini karena variabel bebasnya merupakan kombinasi antara variabel kontinu (data metrik) dan kategorial (data non metrik) (Novade & Laksito, 2015). Dalam pengujian statistik data *nonmetric*, distribusi populasi tidak harus berdistribusi normal. Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel tersebut memiliki peluang terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan model regresi logistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 ZX1 + \beta_2 ZX2 + \beta_3 ZX3 + \beta_4 ZX4 + \beta_5 ZX5 + \beta_6 ZX6 + e$$

Keterangan:

Y = Opini BPK (WTP = 1, WDP = 0)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi Model

ZX1 = Pendidikan Kepala Daerah

ZX2 = Jumlah ASN

ZX3 = Studi Banding

ZX4 = Tingkat Urbanisasi

ZX5 = Jumlah Anggota DPRD

ZX6 = *Intergovernmental Revenue*

e = Residual eror

#### 3.4.6 Pengujian Hipotesis

Estimasi parameter dilihat dari koefisien regresi. Koefisien regresi terdapat pada tabel *variabel in the equation*.

1. Jika tingkat signifikan lebih kecil dari 0.05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya variabel independen signifikan terhadap variabel dependen atau hipotesis alternatif didukung
2. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya variabel independen tidak signifikan dengan variabel dependen atau hipotesis alternatif tidak didukung.

## BAB IV

### DATA DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pendidikan kepala daerah, jumlah ASN, studi banding, tingkat urbanisasi, jumlah anggota DPRD, dan *intergovernmental revenue* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 2017 yang telah memenuhi kriteria. Hasil dalam penelitian ini akan dijadikan informasi dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Data-data tersebut merupakan data yang dicantumkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah provinsi. Pengujian data dengan model analisis regresi logistik dengan menggunakan SPSS 21.

#### 4.1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Variabel dalam penelitian ini yaitu pendidikan kepala daerah, jumlah ASN, studi banding, tingkat urbanisasi, dan jumlah anggota DPRD sebagai variabel independen, *intergovernmental revenue* sebagai variabel kontrol serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Variabel tersebut telah diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Jenis Variabel	n	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Pendidikan Kepala Daerah	Independen	100	1	4	2,78	1,001
Jumlah ASN	Independen	100	525	20581	6117,08	3760,253
Studi Banding	Independen	100	0	1	0,71	0,456
Tingkat Urbanisasi	Independen	100	2,99	13340,00	2108,7493	2887,60816
Jumlah Anggota DPRD	Independen	100	18	50	36,08	10,464
<i>Intergovernmental Revenue</i>	Kontrol	100	0,062	1,229	0,50485	0,166105
Kualitas Laporan Keuangan Pemda (Opini BPK)	Dependen	100	0	1	0,84	0,368

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Hasil analisis statistik deskriptif sebagaimana diringkas pada Tabel

4.1 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel pendidikan kepala daerah diukur menggunakan skala pengukuran yang dikelompokkan menjadi 4 angka. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa pendidikan kepala daerah memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 4 dengan rata-rata 2,78 dan standar deviasi 1,001. Nilai minimum sebesar 1 artinya daerah yang memiliki tingkat pendidikan kepala daerah terkecil adalah Kota Sabang, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Lhokseumawe, Kota Sibolga,

Kabupaten Cilacap, Kota Mataram, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Fak-Fak dimana tingkat pendidikan kepala daerah adalah SMA sedangkan nilai maksimum sebesar 4 artinya kabupaten/kota dimana tingkat pendidikan akhir kepala daerah adalah S3 yaitu Kabupaten Nias, Kota Medan, Kabupaten Kerinci, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Tapin, Kabupaten Paser, Kota Kupang, Kabupaten Mempawah, Kota Bontang, Kota Tarakan, Kota Manado, Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate, dan Kota Sorong.

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diukur menggunakan dengan logaritma natural ( $\ln$ ) dari jumlah ASN dari kabupaten/kota tersebut. Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa angka minimum 525 sedangkan angka maksimum 20581. Jumlah ASN rata-rata 6117,08 dan standar deviasi 3760,253. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah ASN terendah adalah Kabupaten Barito Timur sebanyak 525 dan pemerintah daerah yang memiliki jumlah ASN tertinggi adalah Kabupaten Bandung dengan jumlah 20581.
3. Studi banding menggunakan skala pengukuran yang dikelompokkan menjadi 2 angka. Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 dapat

diketahui bahwa angka minimum 0 dan maksimum 1. Diketahui bahwa studi banding memiliki rata-rata 0,71 dan standar deviasi 0,456. Nilai minimum sebesar 0 artinya terdapat kabupaten/kota yang tidak melakukan studi banding pada tahun anggaran 2017 yaitu Kota Langsa, Kabupaten Nias, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Lahat, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Merangin, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kota Salatiga, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Tangerang, Kabupaten Paser, Kabupaten Alor, Kota Manado, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Asmat, Kabupaten Fakfak, dan Kota Sorong. Nilai maksimum sebesar 1 artinya kabupaten/kota yang melakukan studi banding pada tahun 2017 yaitu 71 kabupaten/kota lainnya.

4. Tingkat urbanisasi diukur dengan logaritma natural ( $\ln$ ) dari kepadatan populasi per  $\text{km}^2$  dari kabupaten/kota tersebut. Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa tingkat urbanisasi memiliki nilai minimum 2,99 dan nilai maksimum 13340,00. Tingkat urbanisasi memiliki rata-rata 2108,7493 dan standar deviasi 2887,60816. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat urbanisasi yang terendah adalah Kabupaten Asmat yaitu 2,99  $\text{km}^2$  dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat urbanisasi tertinggi yaitu 13340  $\text{km}^2$ .

5. Jumlah anggota DPRD diukur dengan logaritma natural ( $\ln$ ) dari jumlah anggota DPRD yang berada di daerah kabupaten/kota tersebut. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa jumlah anggota DPRD memiliki nilai minimum sebesar 18 dan maksimum sebesar 50 orang dengan rata-rata nilai 36,08 dan standar deviasi sebesar 10,464. Nilai minimum sebesar 18 artinya daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD terkecil yaitu Kabupaten Pulau Taliabu dan nilai maksimum sebesar 50 artinya daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD tertinggi yaitu Kota Medan, Kota Palembang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kota Tangerang, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Makassar.
6. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah *intergovernmental revenue* diukur berdasarkan dari total dana perimbangan dibagi total pendapatan pada masing-masing kabupaten/kota tersebut. Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa angka minimum 0,062 dan angka maksimum 1,229. *Intergovernmental revenue* memiliki rata-rata 0,50485 dan standar deviasi 0,166105. Nilai minimum 0,062 artinya Kabupaten Seruyan mendapatkan transfer terkecil dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pembiayaan operasi pemerintah daerah. Nilai

maksimum 1,229 artinya Kota Magelang mendapatkan transfer terbesar dari pemerintah pusat yang digunakan sebagai pembiayaan operasi di pemerintah daerah.

7. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan opini BPK, dimana skala pengukurannya dikelompokkan menjadi 2 angka. Angka 1 untuk opini WTP dan angka 0 untuk opini WDP. Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa angka minimum 0 dan maksimum 1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki rata-rata 0,84 dan standar deviasi 0,36. Nilai minimum 0 artinya kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Terdapat 16 kabupaten/kota yang mendapatkan opini WDP yaitu Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Nias, Kota Medan, Kota Sibolga, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Tegal, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kota Kupang, Kota Tarakan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu. Nilai maksimum 1 artinya kabupaten/kota mendapatkan opini WTP dari BPK. Sebanyak 74 kabupaten/kota mendapatkan opini WTP dari BPK.

#### **4.2 MENILAI KESELURUHAN MODEL (*OVERALL MODEL FIT*)**

Uji *overall model fit* atau uji keseluruhan model dilakukan untuk menguji variabel independen di dalam regresi logistik secara serentak atau

simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji *overall model fit* ini dihitung dari perbedaan nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  ( $-2LL$ ) pada awal (*block number=0*), dimana model hanya memasukkan konstanta dengan  $-2 \log \text{likelihood}$  ( $-2LL$ ) pada akhir (*block number=1*), dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Hipotesis untuk menilai fit adalah:

$H_0$ : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

$H_1$ : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Tabel 4.2 Iteration History Block 0

Iteration		-2 Log Likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	89,212	1,360
	2	87,943	1,632
	3	87,934	1,658
	4	87,934	1,658

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Hasil *output* SPSS pada Tabel 4.2 merupakan  $-2 \log \text{likelihood}$  yang terdiri dari konstanta saja. Nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  yang hanya memasukkan konstanta saja adalah sebesar 87,934. Secara matematis, angka tersebut signifikan pada alpha 5% dan berarti bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak. Hal tersebut berarti bahwa hanya konstanta saja yang fit dengan data (sebelum dimasukkan variabel bebas ke dalam model regresi).

Tabel 4.3 Iteration History Block 1

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients							
		Constant	ZX1	ZX2	ZX3	ZX4	ZX5	ZX6	
Step 1	1	85,831	1,360	-,015	-,294	,016	,006	,286	-,249
	2	83,212	1,702	-,042	-,545	,030	,026	,537	-,413
	3	83,094	1,782	-,059	-,636	,034	,040	,636	-,459
	4	83,094	1,787	-,061	-,642	,034	,042	,644	-,461
	5	83,094	1,787	-,061	-,642	,034	,042	,644	-,461

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Hasil *output* SPSS pada Tabel 4.3 merupakan  $-2 \log \text{likelihood}$  yang terdiri atas konstanta dan variabel bebas. Selanjutnya adalah membandingkan kedua nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  tersebut, setelah variabel bebas dimasukkan pada model regresi maka nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  pada Tabel 4.3 sebesar 83,094. Penurunan nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  ini dapat diartikan bahwa penambahan variabel bebas kedalam model dapat memperbaiki model fit dan dapat menunjukkan model regresi yang lebih baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Tabel 4.4 Perbandingan Nilai -2LL

Omnibus Tests of Model Coefficients

	Chi-square	Df	Sig
Step 1 Step	4,840	6	,564
Block	4,840	6	,564
Model	4,840	6	,564

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Tabel 4.4 merupakan tampilan perbandingan nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  yang terdiri dari konstanta saja (Tabel 4.2) dan  $-2 \log \text{likelihood}$  yang terdiri dari konstanta dan variabel bebas (Tabel 4.3). Perbandingan tersebut

mengikuti sebaran *chi-square*. Nilai *chi-square* sebesar 4,840 dengan df 6. Penurunan nilai  $-2 \text{ Log likelihood}$  ini dapat diartikan bahwa penambahan variabel bebas kedalam model dapat memperbaiki model fit dan dapat menunjukkan model regresi yang lebih baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan data. Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh nilai sig. model sebesar 56,4 karena nilai tersebut lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan kepala daerah, jumlah ASN, studi banding, tingkat urbanisasi, jumlah anggota DPRD, dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.3 MENGUJI KELAYAKAN MODEL REGRESI

Kelayakan model regresi bertujuan untuk menilai kesesuaian model dengan data, dinilai menggunakan *hosmer and lemeshow's goodness of fit test* yaitu menguji hipotesis nol bahwa data sesuai dengan model (tidak terdapat perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit) yang diukur dengan nilai *chi-square*. Kecocokan atau kelayakan model regresi secara keseluruhan menggunakan *hosmer and lemeshow's goodness of fit test* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai *hosmer and lemeshow's goodness of fit test*  $\leq 0,05$  artinya terdapat perbedaan signifikan antara model dengan observasinya sehingga *goodness fit* tidak baik, karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya.

- b. Jika *hosmer and lemeshow's goodness of fit test*  $\geq 0,05$  artinya model dapat memprediksikan nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit* ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Step	Chi-square	df	Sig.
1	3,650	8	,887

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 maka dapat dilihat dari kriteria kelayakan model yang diuji *hosmer and lemeshow's goodness of fit test* memiliki *chi-square* adalah 3,650 dengan probabilitas signifikansi 0,887. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menyebabkan hipotesis  $H_0$  gagal ditolak. Artinya, tidak diperoleh perbedaan antara data estimasi model regresi logistik dengan data observasi, sehingga model sudah layak dan tepat digunakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian secara umum dapat dikatakan sesuai dan layak.

#### 4.4 KOEFISIEN DETERMINASI

Koefisien determinasi (*nagelkerke r square*) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabilitas variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik

dapat dilihat pada nilai *nagelkerke r square*. Nilai *nagelkerke r square* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	83,094 <sup>a</sup>	,047	,081

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Hasil *output* pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai *nagelkerke r square* sebesar 0,081. Nilai *nagelkerke r square* menunjukkan bahwa 8,1% probabilitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel independen, sisanya sebesar 91,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara prediktor dan prediksi.

#### 4.5 ANALISIS REGRESI LOGISTIK

Analisis model regresi logistik dilakukan untuk mengetahui probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen, oleh karena itu dilakukannya analisis ini. Tabel 4.7 menunjukkan hasil analisis koefisien model regresi.

Tabel 4.7 Hasil Analisis Model Regresi

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp (B)
Step 1 <sup>a</sup> ZX1	-,061	,303	,040	1	,841	,941
ZX2	-,642	,441	2,123	1	,145	,526
ZX3	,034	,281	,014	1	,904	1,034
ZX4	,042	,311	,018	1	,893	1,043
ZX5	,644	,480	1,801	1	,180	1,904

ZX6	-,461	,298	2,402	1	,121	,630
Constant	1,787	,304	34,613	1	,000	5,974

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 ZX1 + \beta_2 ZX2 + \beta_3 ZX3 + \beta_4 ZX4 + \beta_5 ZX5 + \beta_6 ZX6 + e$$

$$Y = 1,787 - 0,061 ZX1 - 0,642 ZX2 + 0,034 ZX3 + 0,042 ZX4 + 0,644 ZX5 - 0,461 ZX6 + e$$

1.  $\alpha = 1,787$

Nilai konstan ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 1,787 sebelum atau tanpa adanya variabel pendidikan kepala daerah, jumlah ASN, studi banding, tingkat urbanisasi, jumlah anggota DPRD, dan *intergovernmental revenue*.

2.  $\beta_1 = -0,061$

Nilai

Nilai  $\beta_1$  sebagai parameter pada variabel pendidikan kepala daerah (ZX1) sebesar -,061 yang artinya apabila pendidikan kepala daerah meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurun sebesar -,061 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

3.  $\beta_2 = -0,642$

Nilai  $\beta_2$  sebagai parameter pada variabel jumlah ASN (ZX2) sebesar -0,642 yang artinya apabila variabel jumlah ASN meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurun

sebesar -0,642 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

4.  $\beta_3 = 0,034$

Nilai  $\beta_3$  sebagai parameter pada variabel studi banding (ZX3) sebesar 0,034 yang artinya apabila variabel studi banding meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,034 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

5.  $\beta_4 = 0,042$

Nilai  $\beta_4$  sebagai parameter pada variabel tingkat urbanisasi (ZX4), sebesar 0,042 yang artinya apabila variabel tingkat urbanisasi meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,042 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

6.  $\beta_5 = 0,644$

Nilai  $\beta_5$  sebagai parameter pada variabel jumlah anggota DPRD (ZX5), sebesar 0,644 yang artinya apabila variabel jumlah anggota DPRD meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,644 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

7.  $\beta_6 = -0,461$

Nilai  $\beta_6$  sebagai parameter pada variabel *intergovernmental revenue* (ZX6) sebesar -0,461 yang artinya apabila variabel *intergovernmental*

*revenue* meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurun sebesar -0,461 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

#### 4.6 PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu pendidikan kepala daerah, jumlah ASN, studi banding, tingkat urbanisasi, jumlah anggota DPRD, dan *intergovernmental revenue* dengan menggunakan hasil uji regresi logistik yang ditunjukkan dalam *variable in equation*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) dengan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) = 0,05 (5%). Jika tingkat signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima. Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh pendidikan kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian pada variabel ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah yang dihitung dengan pendidikan kepala daerah memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,061 dengan tingkat signifikansi 0,841 yang lebih besar dari (5%). Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau dengan kata lain  $H_1$  tidak didukung.

2. Pengaruh jumlah ASN terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian pada variabel ini menunjukkan bahwa jumlah ASN yang diprosikan dengan logaritma natural ( $\ln$ ) dari jumlah ASN memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,642 dengan tingkat signifikansi 0,145 yang lebih besar dari (5%). Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah ASN tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau dengan kata lain  $H_2$  tidak didukung.

3. Pengaruh studi banding terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian pada variabel ini menunjukkan bahwa studi banding yang dihitung dengan pelaksanaan studi banding yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,034 dengan tingkat signifikansi 0,904 yang lebih besar dari (5%). Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel studi banding tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau dengan kata lain  $H_3$  tidak didukung.

4. Pengaruh tingkat urbanisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian pada variabel ini menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi yang diprosikan dengan logaritma natural ( $\ln$ ) dari kepadatan populasi per  $\text{km}^2$  memiliki koefisien regresi positif sebesar

0,042 dengan tingkat signifikansi 0,893 yang lebih besar dari (5%). Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat urbanisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau dengan kata lain  $H_4$  tidak didukung.

5. Pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian pada variabel ini menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD yang diprosikan dengan logaritma natural (Ln) dari jumlah anggota DPRD memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,644 dengan tingkat signifikansi 0,180 yang lebih besar dari (5%). Dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau dengan kata lain  $H_5$  tidak didukung.

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesa	Deskriptif	B	Sig (p-value)	Hasil
$H_1$	Pendidikan kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	-0,061	0,841	Tidak didukung
$H_2$	Jumlah ASN terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	-0,642	0,145	Tidak didukung
$H_3$	Studi banding terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	0,034	0,904	Tidak didukung
$H_4$	Tingkat urbanisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	0,042	0,893	Tidak didukung
$H_5$	Jumlah anggota DPRD	0,644	0,180	Tidak

	terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah			didukung
--	--	--	--	----------

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

## 4.7 PEMBAHASAN

### 4.7.1 Pengaruh pendidikan kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa pendidikan kepala daerah tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai p-value 0,841 dimana nilai ini lebih besar dari nilai alfanya yaitu 0,05 serta arah koefisien yang berbeda. Hal tersebut berarti semakin tinggi pendidikan kepala daerah tidak terbukti dapat memberikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Seharusnya semakin tinggi pendidikan kepala daerah maka semakin baik kepala daerah dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan daerah, akan tetapi dalam penelitian ini pendidikan kepala daerah tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan, kemungkinan yang menjadikan suatu alasan yaitu kepala daerah yang memiliki pendidikan tinggi bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi karena masih banyak kepala daerah yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum sehingga tidak mudah dalam memahami penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Organisasi yang dapat mengembangkan inovasi dengan baik akan mampu bersaing dan meningkatkan nilai organisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk menjadi lebih baik (Pahlevi & Setiawan, 2017). Berdasarkan hal tersebut, kepala daerah yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu memiliki pemahaman lebih baik atas lingkungan pemerintahan serta komitmen yang lebih tinggi terhadap kepuasan masyarakat.

Dalam asumsi teori institusional, menurut peneliti bahwa tingkat pendidikan kepala daerah termasuk *normative isomorphism* karena pendidikan kepala daerah merupakan suatu peran profesional dalam memperjuangkan praktek adopsi yang seharusnya dilakukan. Jika diartikan, logikanya adalah kepala daerah memiliki peran dalam memberikan pengaruh terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dengan mudah untuk mengetahui dan memahami penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Namun temuan ini tidak didukung oleh teori institusional, dalam penelitian ini yang menyatakan mengenai pengaruh pendidikan kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tingginya tingkat pendidikan kepala daerah tidak menyebabkan suatu organisasi melakukan *normative isomorphism* dalam rangka memenuhi tekanan dari luar organisasi.

Hasil ini tidak sejalan dengan harapan peneliti, bahwa kepala daerah yang memiliki pendidikan semakin tinggi akan semakin baik dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian Jaenudin dan Chairunisa (2015) mengatakan bahwa pemimpin yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena dapat meningkatkan kinerja pegawai, dimana ketika kinerja pegawai meningkat maka dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Penelitian sebelumnya oleh Avellaneda (2012) mengatakan bahwa tingkat pendidikan dan jenis pendidikan Kepala Daerah di Kolombia tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Rahmanti dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa tidak menemukan dampak signifikan mengenai tingginya pendidikan bupati/walikota terhadap audit *delay*. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pratiwi dan Aryani (2016) mengatakan bahwa pendidikan kepala daerah tidak ada pengaruhnya terhadap opini BPK dan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wungow et al (2016) mengatakan bahwa tidak semua pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat memahami dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan daerah karena masih banyak pegawai disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditempatkan tidak sesuai dengan

bidang keahliannya dan kurangnya pegawai yang berlatar belakang disiplin ilmu akuntansi. Pegawai yang memiliki disiplin ilmu akuntansi merupakan pegawai yang sudah memahami akuntansi. Seseorang dapat dikatakan paham terhadap akuntansi apabila orang tersebut mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan hingga menjadi suatu laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, penelitian ini sejalan dengan Rahmanti dan Prastiwi (2011) mengatakan bahwa pendidikan kepala daerah tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.7.2 Pengaruh jumlah ASN terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa jumlah ASN tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai p-valuenya sebesar 0,145 dimana nilai ini lebih besar dari nilai alfanya yaitu 0,05 serta arah koefisien yang berbeda. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan harapan, bahwa jumlah ASN lebih banyak akan lebih menghasilkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP daripada pemerintah daerah yang memiliki jumlah ASN sedikit. Kemungkinan tidak berpengaruhnya variabel jumlah ASN ini karena rendahnya kompetensi atau kualitas ASN dalam memenuhi apa saja yang dibutuhkan agar laporan keuangan sesuai dengan kaidah yang

berlaku seperti relevan, andal, dapat bandingkan, dan dapat pahami yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 2010.

Laporan keuangan wajib disampaikan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, dimana pemerintah daerah yaitu kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggara pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah, kemudian melimpahkan kekuasaanya untuk dapat dilakukan oleh masing-masing ASN di daerah kabupaten/kota. Pada struktur pemerintahan di Indonesia ASN merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang diterjadi di lingkungan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan ASN mendapat tekanan dari organisasi lain sehingga berdampak terhadap pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam asumsi teori institusional terdapat *coercive isomorphism* yaitu tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain karena semakin banyak jumlah ASN semakin banyak aturan dan ketentuan sehingga semakin banyak urusan ASN dalam memberikan informasi laporan keuangan. Semakin banyak jumlah ASN yang dimiliki artinya semakin kompleks pemerintah tersebut mengakibatkan pemenuhan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah semakin tinggi dan berakibat terhadap kualitas laporan keuangan karena semakin banyak hal yang harus diungkapkan dalam memenuhi apa saja yang dibutuhkan agar laporan keuangan

sesuai dengan kaidah yang berlaku seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, akan tetapi jumlah ASN sebagai *coercive isomorphism* lemah untuk memahami makna pentingnya laporan keuangan yang berkualitas.

Temuan ini tidak didukung oleh teori institusional yang menyatakan mengenai jumlah ASN terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Banyaknya jumlah ASN tidak menyebabkan suatu organisasi melakukan *coercive isomorphism* dalam rangka memenuhi tekanan dari luar organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Arza (2019) membuktikan bahwa jumlah ASN tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah ASN belum mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4.7.3 Pengaruh studi banding terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa dilakukannya studi banding tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai p-valuenya sebesar 0,904 dimana nilai ini lebih besar dari nilai alfabanya yaitu 0,05 serta arah koefisien yang berbeda. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan harapan peneliti, bahwa dengan diadakannya studi banding dapat meningkatkan kinerja pegawai, dimana ketika kinerja pegawai baik maka dapat menghasilkan

kualitas laporan keuangan yang baik juga. Tidak berpengaruhnya studi banding kemungkinan dikarenakan tidak semua daerah yang mengikuti studi banding tentang pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan laporan keuangan daerah dan kemungkinan dikarenakan pelaksanaan program studi banding tidak selalu dapat memperbaiki kinerja yang buruk terhadap pegawai yang mengikuti studi banding.

Pelaksanaan studi banding dengan cara dilakukannya bimbingan teknis oleh suatu pemerintah daerah kepada pemerintah daerah yang memiliki kualitas manajemen dan pelaporan keuangan yang lebih baik. Kegiatan tersebut perlu dilaksanakan karena memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah daerah yang telah mengikuti studi banding akan mendapatkan perubahan, perubahan tersebut menurut peneliti diklasifikasikan sebagai tindakan *mimetic isomorphism* (kekuatan meniru) agar pemerintah daerah tersebut menjadi pemerintah daerah yang lebih baik. Pelaksanaan studi banding akan memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Temuan ini tidak didukung oleh teori institusional, dalam penelitian yang menyatakan mengenai pengaruh studi banding terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya studi banding tidak menyebabkan suatu organisasi melakukan *mimetic isomorphism* dalam rangka meniru ilmu yang didapat agar memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah.

Berdasarkan *output* penelitian menunjukkan bahwa studi banding tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penyebab faktor tersebut kemungkinan karena penyampaian materi yang diberikan dalam waktu pelaksanaan studi banding untuk peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan belum efektif. Kemungkinan lain yang perlu dilakukan dalam studi banding adalah dengan menggunakan metode atau cara yang lebih efektif karena peserta studi banding memiliki latar belakang yang berbeda-beda bidangnya.

Penelitian ini sejalan dengan Trawardani et al. (2015) mengatakan bahwa studi banding tidak berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena studi banding tidak berpengaruh terhadap kemampuan kerja yang berdampak pada kinerja pemerintah. Sehingga apabila pemerintah melakukan studi banding tidak sesuai kemampuan akan sulit untuk memahami bidang tersebut dan tidak memberikan dampak yang lebih baik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya studi banding belum mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini tidak didukung oleh teori institusional dalam penelitian ini yang menyatakan mengenai pengaruh studi banding terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya studi banding tidak menyebabkan suatu organisasi melakukan *mimetic*

*isomorphism* dalam rangka meniru ilmu yang didapat agar memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah.

#### 4.7.4 Tingkat urbanisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis membuktikan tingkat urbanisasi tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai p-valuenya sebesar 0,893 dimana nilai ini lebih besar dari nilai alfabanya yaitu 0,05 serta arah koefisien yang berbeda. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan harapan peneliti bahwa daerah urban akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik karena kualitas laporan keuangan akan lebih baik bagi pemerintah daerah yang memiliki tingkat urbanisasi lebih tinggi karena terdapat agenda-agenda reformasi politik, sosial, dan ekonomi yang lebih tinggi dan progresif dibandingkan daerah non urban (Ratmono, 2013).

Berdasarkan *output* penelitian, kemungkinan faktor yang bisa menyebabkan tingkat urbanisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah penyebaran penduduk yang belum merata dan masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu sehingga pembangunan daerah belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini sejalan dengan Huda (2015) mengatakan bahwa tingkat urbanisasi tidak berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini tidak didukung oleh teori institusional, dalam penelitian yang menyatakan mengenai pengaruh tingkat urbanisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat urbanisasi tidak menyebabkan suatu organisasi melakukan *normative isomorphism* dalam rangka meningkatkan profesionalisme.

#### **4.7.5** Pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa jumlah anggota DPRD tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai p-valuenya sebesar 0,180 dimana nilai ini lebih besar dari nilai alfabanya yaitu 0,05 serta arah koefisien yang berbeda. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan harapan peneliti, bahwa jumlah anggota DPRD lebih banyak akan lebih menghasilkan kualitas laporan keuangan. Faktor yang menyebabkan tidak berpengaruhnya jumlah anggota DPRD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kemungkinan dikarenakan keberadaan anggota DPRD pada daerah tersebut tidak dapat menekan untuk menaikkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana kemungkinan hal tersebut bisa terjadi karena pada saat pemilihan anggota DPRD menggunakan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sehingga rakyat yang memilih secara langsung kepala daerahnya. Maka saat ini kepala daerah tidak dipilih oleh DPRD seperti

pada zaman dahulu, dimana hal tersebut menyebabkan kurangnya peran DPRD dalam pengendalian kualitas laporan keuangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan atau untuk mengontrol jalannya suatu pemerintah agar tetap sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah agar tercipta pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Hal tersebut menunjukkan DPRD mendapat tekanan dari organisasi lain sehingga memiliki dampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam asumsi teori institusional terdapat *coercive isomorphism* artinya adanya tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain untuk mengubah sistem sehingga menimbulkan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini dimana jumlah anggota DPRD sebagai *coercive isomorphism* dapat diartikan lemah dalam memahami makna pentingnya laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini berbeda dengan penelitian Madelia (2018) mengatakan bahwa banyaknya jumlah anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang tidak menggambarkan adanya fungsi dan peran yang semakin baik pula, sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya dimiliki anggota DPRD tidak bisa dimaksimalkan. Banyak isu tentang korupsi yang dilakukan anggota DPRD menyebabkan penurunan

kinerja pemerintah yang memberikan dampak buruk yang berakibat pada penurunan kinerja atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa kualitas dari anggota DPRD lebih utama dibandingkan dengan kuantitas anggota DPRD karena agar terciptanya fungsi pengawasan yang baik dalam pemerintahan. Sehingga mengakibatkan banyaknya jumlah anggota DPRD belum mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.7.6 Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa *intergovernmental revenue* tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena arah koefisien yang berbeda. Bahwa *intergovernmental revenue* merupakan jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk pembiayaan operasi pemerintah daerah. Faktor yang menyebabkan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kemungkinan karena di era desentralisasi ini hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak terlalu dekat sehingga tidak adanya monitoring khusus atau pemerintah pusat kurang mengontrol mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, kemungkinan jika ada monitoring tidak digunakan dalam penentuan anggaran dana

perimbangan di daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Penelitian sebelumnya oleh Madelia (2018) mengatakan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah karena insentif pelaporan keuangan baru diberikan mulai tahun 2010 namun lebih berfokus untuk pencapaian opini bukan untuk kualitas pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) mengatakan bahwa tingginya tingkat *intergovernmental revenue* tidak menekan pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan lebih pada LKPD yang disebabkan karena pemerintah pusat kurang memberikan kontrol dalam penggunaan dana perimbangan. Hasil tersebut memberikan makna bahwa semakin besar *intergovernmental revenue* yang diperoleh suatu pemerintah daerah maka semakin sedikit yang akan diungkapkan pemerintah daerah pada laporan keuangannya. Pemerintah lebih difokuskan pada pengelolaan akuntansi dan pengendalian aset daerah yang sering mengalami masalah dan dianggap lebih material. Pengelola keuangan yang masih rendah juga menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya *intergovernmental revenue* belum mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 SIMPULAN

Kualitas laporan keuangan merupakan permasalahan yang masih perlu diperhatikan karena memiliki pengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik dapat memberikan dedikasi terhadap pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang telah dibuat. Dari pembahasan yang dilakukan telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya tidak semua kepala daerah yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan. Kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi kemungkinan yang menjadikan suatu alasan, karena masih banyak kepala daerah yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum sehingga tidak mudah memahami penyusun dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Jadi tidak semua kepala daerah harus berpendidikan tinggi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Jumlah ASN tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini kemungkinan karena rendahnya kompetensi atau kualitas ASN dalam memenuhi apa saja yang dibutuhkan agar

laporan keuangan sesuai dengan kaidah yang berlaku seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 2010.

3. Studi banding tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya studi banding tidak memberikan pengaruh terhadap kemampuan kerja. Kemungkinan dikarenakan penyampaian materi yang diberikan dalam waktu pelaksanaan studi banding untuk peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan belum efektif. Kemungkinan lain yang perlu dilakukan dalam studi banding adalah dengan menggunakan metode atau cara yang lebih efektif karena peserta studi banding memiliki latar belakang yang berbeda-beda bidangnya.
4. Tingkat urbanisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya penyebaran penduduk yang belum merata dan masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu sehingga pembangunan daerah belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
5. Jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kemungkinan dikarenakan keberadaan anggota DPRD pada daerah tersebut tidak dapat menekan untuk menaikkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana kemungkinan hal tersebut bisa terjadi karena pada saat pemilihan anggota DPRD menggunakan mekanisme PILKADA sehingga rakyat yang memilih secara langsung kepala daerahnya, dimana hal tersebut

menyebabkan kurangnya peran DPRD dalam pengendalian kualitas laporan keuangan. Kualitas dari anggota DPRD lebih diutamakan dibandingkan dengan kuantitas anggota DPRD karena agar terciptanya fungsi pengawasan yang baik dalam pemerintahan.

6. *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak menyebabkan peningkatan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemungkinan karena hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak terlalu dekat sehingga tidak adanya monitoring khusus mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, kemungkinan jika ada monitoring tidak digunakan dalam penentuan anggaran dana perimbangan di daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporannya.

Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran tambahan dan referensi dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai kualitas laporan keuangan kepada pemerintah daerah bahwa laporan keuangan merupakan salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk melakukan transparansi atas informasi keuangan serta merupakan cara bagi pemerintah daerah untuk mengetahui apakah telah menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 5.2 KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyadari bahwa hasil dari penelitian ini belum sempurna karena memiliki keterbatasan yang apabila diatasi pada penelitian selanjutnya akan dapat memperbaiki hasil penelitian.

Beberapa keterbatasan dari penelitian ini adalah:

1. Pada penelitian ini masih banyak kepala daerah yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum sehingga tidak mudah dalam memahami penyusun dan penyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Penggunaan data jumlah ASN mencakup seluruh bidang atau secara umum, tidak spesifik atas latar belakang pendidikannya.
3. Data studi banding yang digunakan dalam penelitian ini kurang valid karena pelaksanaan studi banding yang tidak disertai dengan laporan hasil studi banding.
4. Penggunaan data jumlah anggota DPRD dalam penelitian ini mencakup seluruh bidang atau secara umum.
5. Nilai *nagelkerke r square* cukup rendah yaitu 8,1% menunjukkan bahwa hanya 8,1% probabilitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu pendidikan kepala daerah, jumlah ASN, studi banding, tingkat urbanisasi, jumlah anggota DPRD, dan *intergovernmental revenue*. Sisanya sebesar 91,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

6. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu periode akuntansi yaitu tahun 2017 sehingga tidak terlihat perkembangan laporan keuangan.

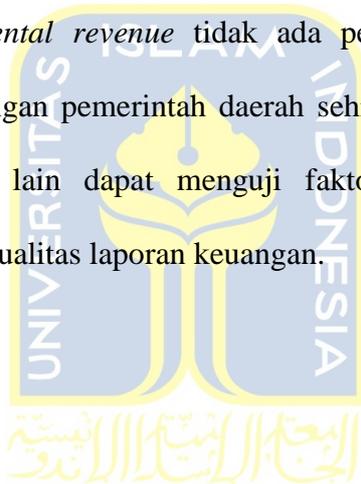
### 5.3 SARAN

Saran untuk tindak lanjut hasil penelitian ini berdasarkan hasil yang ada terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah:

1. Diharapkan dapat meningkatkan pendidikan kepala daerah di bidang akuntansi atau ekonomi agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Menggunakan data jumlah ASN yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau ekonomi agar laporan keuangan dapat diselesaikan oleh SDM yang berkompeten dalam bidangnya.
3. Menggunakan data studi banding yang disertai laporan hasil studi banding.
4. Menggunakan data jumlah anggota DPRD yang berhubungan di bidang keuangan seperti bagian anggaran dan komisi B (bidang perekonomian dan keuangan) agar laporan keuangan dapat diselesaikan oleh SDM yang berkompeten dalam bidangnya.
5. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menambahkan atau menggunakan faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan opini audit seperti luas wilayah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga nilai *nagelkerke r square* meningkat. Semakin tinggi *nagelkerke r*

*square* maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

6. Penambahan periode laporan keuangan sehingga terlihat perkembangan kualitas laporan keuangan dan sekaligus dapat mengurangi masalah dalam pengolahan data.
7. Pada penelitian ini sesuai dengan model yang terbentuk dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan kepala daerah, jumlah ASN, studi banding, tingkat urbanisasi, jumlah anggota DPRD, dan *intergovernmental revenue* tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga kedepannya pemerintah atau peneliti lain dapat menguji faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan.



## DAFTAR REFERENSI

- Binus University Quality Management Center*. (2014, Oktober 28). Diambil kembali dari Studi Banding: <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/pengertian-studi-banding/>
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari*. (2014, Maret 19). Diambil kembali dari Meraih Status WTP: <https://dprd.batangharikab.go.id/artikel-20-meraih-status-wtp.html>
- Anshari, B. (2016). Analisis Pengaruh Current Ratio (CR) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham di Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 2(2), 97-115.
- Arifin, J., Tower, G., & Porter, S. (2015). Financial Reporting Compliance in Indonesian Local Governments: Mimetic Pressure Dominates. *JAAI* 19(1), 68-84.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Yuridika* 28(2), 1-29.
- Astuti, D. D., & Sa'adah, N. (2019). Pelimpahan Kewenangan BPK kepada Perwakilan BPK dalam Pemeriksaan di Daerah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(1), 52-63.
- Avellaneda, C. N. (2012). Do Politics or Mayors' Demographics Matter for Municipal Revenue Expansion? *Public Management Review* 14(8), 1061-1086.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017, 6 22). *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia* . Diambil kembali dari Opini WTP dan Korupsi: <https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-dan-korupsi>
- Benu, F. L., & Benu, A. S. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, Pertanian, dan Lainnya)*. Jakarta: Prenadamedia Group .
- Christalisana, C. (2018). Pengaruh Pengalaman dan Karakter Sumber Daya Manusia Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap Kualitas Pekerjaan pada Proyek di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Fondasi* 7(1), 87-98.
- Desipradani, G., & Nuraini, F. (2018). Variabel Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya. *Majalah Ekonomi* XXIII(2), 264-285.

- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review* 48(2), 147-160.
- Girsang, H. A., & Yuyetta, E. N. (2015). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting* 4(4), 1-11.
- Governmental Accounting Standards Board. (1999). Basic Financial Statements and Management's Discussion and Analysis for State and Local Governments. *Statement No.34 of the Governmental Accounting Standard Board*.
- Hamta, F. (2015). *Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hartati. (2016). Pengaruh Pendidikan, Pelatihan Teknis Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( Studi Pada SKPD Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis* 4(9), 41-52.
- Hidayah, D. (2017). Pengaruh Kemandirian Daerah, Intergovernmental revenue dan Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Studi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2014). *JOM Fekon* 4(20), 4484-4498.
- Huda, A. S. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress, dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal di Nusa Tenggara Barat. *ASSETS* 5(2), 1-12.
- Jaenudin, & Chairunisa, F. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan. *Jurnal Administrasi Negara* 21(2), 50-61.
- Kadarisman, A., & Gemiharto, I. (2017). Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Agregasi* 5(1), 1-22.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting* 3(3), 1-11.
- Kuncoro, M. (2018). Metode Kuantitatif . Dalam *Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Kelima*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN .

- Lesmanawati, D. (2019). Pengaruh Local Government Wealth, Intergovernmental Revenue dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia secara Online. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 15(2), 109-116.
- Madelia, M. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Jumlah Anggota Legislatif dan Opini Audit BPK terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 3(1), 16-26.
- Marhawai. (2015). Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2010 s.d 2014). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 8(1), 49-58.
- Mariandini, F. I., Irianto, G., & Nurkholis. (2018). Intitusional Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Economia* 14(1), 16-38.
- Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintah dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD. *Accounting Analysis Journal* 4(4), 1-11.
- Munawar, Nadir, N., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Jumlah Temuan Audit atas SPI dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi* 5(2), 57-67.
- Murina, S., & Rahmawaty. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2(3), 111-120.
- Muzahid, M. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)* 2(2), 179-196.
- Najah, U., & Purwati, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemda, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kualitas Hasil Audit terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daera* 4(2), 70-88.
- Nazaruddin, Darwanis, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Pemahaman Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPK Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Magister Akuntansi* 3(3), 59-68.

- Novade, D., & Laksito, H. (2015). Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013). *Diponegoro Journal of Accounting* 4(2), 1-13.
- Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). *Journal of Accounting* 2(2), 1-15.
- P. Adam, F. (2010). Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia. *PIRAMIDA* 6(1), 1-15.
- Pahlevi, A. R., & Setiawan, D. (2017). Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak Terhadap Kinerja Pemerintah? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* 8(3), 571-582.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009,  
[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZy5i8zZjrAhXZ7XMBHaTZDGQQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fbappeda.depok.go.id%2Ffiles\\_downloads%2F25Permendagri%252032%2520tahun%25202008.pdf&usg=AOvVaw2yH76MMAz9h9ZPqYfyfLx9](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZy5i8zZjrAhXZ7XMBHaTZDGQQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fbappeda.depok.go.id%2Ffiles_downloads%2F25Permendagri%252032%2520tahun%25202008.pdf&usg=AOvVaw2yH76MMAz9h9ZPqYfyfLx9)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 2010,  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUgd3GzZjrAhVz4nMBHe8WCogQFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.djpk.kemenkeu.go.id%2Fattach%2Fpost-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan%2FPP71.pdf&usg=AOvVaw0uBzfnR7Lg80aSddbbHIO5>
- Pradono, F. C., & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 22(2), 188-200.
- Pratama, N. D., & dkk. (2018). Determinan Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah . *JRAK* 8(1), 9-23.
- Pratama, N. D., Abdurahim, A., & Sofyani, H. (2018). Determinan Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah. *JRAK* 8(1), 9-23.

- Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi* 20(2), 167-189.
- Putri, W. M., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(3), 1111-1130.
- Raba, M. R. (2017). Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006. *Lex Crimen* 6(3), 152-160.
- Rafida, Ridwan, Abdullah, M., & Yamin, N. Y. (2019). Pengaruh Intergovernmental Revenue, Kekayaan Pemerintah Daerah dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah). *Jurnal Akun Nabelo* 1(2), 63-70.
- Rahmanti, V. N., & Pratiwi, A. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Beropini Disclaimer. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2(2), 201-216.
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi Volume* 1(2), 28-48.
- Safrida, Y., Nadiarsyah, & Bakar, U. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 3(2), 206-220.
- Santoso, S. (2014). *SPSS 22 from Essential to Expert Skills*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari, I. M., & Tamrin, N. A. (2016). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1(1), 106-121.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal AKuntansi dan Keuangan Indonesia* 9(2), 154-170.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja* 20(2), 179-191.

- Soetomo, S. (2013). Urbanisasi dan Morfologi. Dalam *Proses Perkembangan Peradapan dan Wadah Ruangnya Menuju Ruang yang Manusiawi Edisi Kedua* (hal. 1-207). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sofiyandi, H. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 10(2), 184-205.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8(1)*, 1-94.
- Suparno, & Nanda, R. (2016). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional dan Spesialisasi Fungsional terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 3(2), 105-118.
- Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi* 7(2), 139-149.
- Trawardani, I. B., Prasetya, A., & Mayowan, Y. (2015). Pengaruh Pelatihan terhadap Kemampuan Kerja yang Berdampak pada Kinerja Karyawan (Studi Pada karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lumajang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 29(1), 51-58.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2004, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/15tahun2004uu.htm>
- Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Pasal 21 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2004, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/15tahun2004uu.htm>
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Pasal 32 tentang Keuangan Negara 2003, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW0dSiz5jrAhUL63MBHVCACZIQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bpk.go.id%2Fassets%2Ffiles%2Fstorage%2F2013%2F12%2Ffile\\_storage\\_1386161145.pdf&usg=AOvVaw3ecVJqFrazBJRipkonpIG](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW0dSiz5jrAhUL63MBHVCACZIQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bpk.go.id%2Fassets%2Ffiles%2Fstorage%2F2013%2F12%2Ffile_storage_1386161145.pdf&usg=AOvVaw3ecVJqFrazBJRipkonpIG)

- Villadsen, A. R. (2011). Structural embeddedness of political top executives as explanation of policy isomorphism. *Journal of Public Administration Research and Theory* 21(4), 573-599.
- Waliyyani, G. M., & Mahmud, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 4(2), 1-8.
- Wibowo, S. (2019). Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Pemberian Opini atas Laporan Keuangan Audited (Studi Kasus pada Kementerian di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi* 5(1), 41-52.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia.
- Wijaya, A. F., & Danar, O. R. (2014). *Manajemen Publik; Teori dan Praktik* . Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press) .
- Wijaya, A. H., & Akbar, R. (2013). The Influence of Information, Organizational Objectives and Targets, dan External Pressure Towards The Adoption of Performance Measurement System in Publik Sector . *Journal of Indonesian Economy and Business* 28(1), 62-83.
- Wungow, J. F., Lambey, L., & Pontoh, W. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan dan Jabatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Goodwill* 7(2), 1-15.
- Yenni, E. (2017). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pengalaman Kerja Aparatur terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)* 1(2), 91-96.

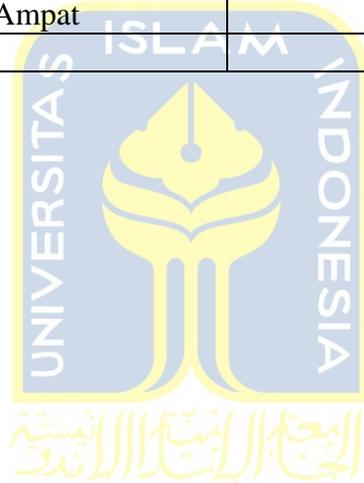
## LAMPIRAN 1

### Data Opini BPK

<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>Opini BPK</b>
Kota Banda Aceh	1
Kota Sabang	1
Kabupaten Aceh Jaya	1
Kabupaten Aceh Utara	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kota Lhokseumawe	1
Kota Langsa	1
Kabupaten Labuhan Batu	0
Kabupaten Nias	0
Kota Medan	0
Kota Sibolga	0
Kota Binjai	1
Kota Pematang Siantar	1
Kota Solok	1
Kota Bukittinggi	1
Kota Padang	1
Kota Padang Panjang	1
Kota Payakumbuh	1
Kabupaten Kampar	1
Kabupaten Kerinci	1
Kabupaten Sarolangun	1
Kabupaten Lahat	1
Kota Lubuklinggau	1
Kabupaten Muara Enim	1
Kota Palembang	1
Kabupaten Merangin	1
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1
Kota Jambi	1
Kabupaten Bandung	1
Kabupaten Bandung Barat	0
Kabupaten Cianjur	1
Kabupaten Purwakarta	1
Kabupaten Subang	0
Kabupaten Sukabumi	1
Kota Bekasi	1
Kota Depok	1
Kota Serang	1
Kabupaten Brebes	0
Kabupaten Cilacap	1

Kabupaten Purworejo	1
Kabupaten Wonosobo	1
Kota Magelang	0
Kota Pekalongan	1
Kota Salatiga	1
Kota Semarang	1
Kota Surakarta	1
Kota Tegal	0
Kabupaten Bantul	1
Kabupaten Gunung Kidul	1
Kabupaten Kulon Progo	1
Kabupaten Sleman	1
Kota Yogyakarta	1
Kabupaten Gresik	1
Kabupaten Sidoarjo	1
Kota Blitar	1
Kota Kediri	1
Kota Madiun	1
Kota Malang	1
Kota Surabaya	1
Kota Tangerang	1
Kabupaten Bangli	1
Kabupaten Lombok Timur	1
Kota Mataram	1
Kabupaten Landak	1
Kabupaten Seruyan	1
Kabupaten Tapin	1
Kabupaten Paser	1
Kota Bitung	1
Kabupaten Alor	0
Kabupaten Flores Timur	0
Kota Kupang	0
Kabupaten Mempawah	1
Kota Pontianak	1
Kota Singkawang	1
Kabupaten Barito Timur	1
Kabupaten Kapuas	1
Kota Palangka Raya	1
Kabupaten Banjar	1
Kota Balikpapan	1
Kota Bontang	1
Kota Samarinda	1
Kabupaten Nunukan	1
Kota Tarakan	0

Kota Manado	1
Kota Tomohon	1
Kabupaten Bone	1
Kabupaten Sinjai	1
Kota Makassar	1
Kota Parepare	1
Kabupaten Halmahera Tengah	0
Kabupaten Kepulauan Sula	0
Kabupaten Pulau Taliabu	0
Kota Ternate	1
Kota Tidore Kepulauan	1
Kabupaten Asmat	1
Kabupaten Merauke	1
Kota Jayapura	1
Kabupaten Fakfak	1
Kabupaten Raja Ampat	1
Kota Sorong	1



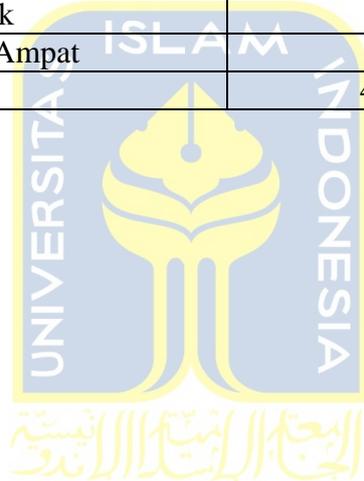
## LAMPIRAN 2

### Data Pendidikan Kepala Daerah

<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>Pendidikan Kepala Daerah</b>
Kota Banda Aceh	3 (Manajemen)
Kota Sabang	1 (SMA)
Kabupaten Aceh Jaya	3 (Ilmu Pemerintahan)
Kabupaten Aceh Utara	1 (SMA)
Kabupaten Aceh Singkil	1 (SMA)
Kota Lhokseumawe	1 (SMA)
Kota Langsa	2 (Ekonomi)
Kabupaten Labuhan Batu	3 (Sains)
Kabupaten Nias	4 (Manajemen)
Kota Medan	4 (Sains)
Kota Sibolga	1 (SMA)
Kota Binjai	3 (Sains)
Kota Pematang Siantar	3 (Manajemen)
Kota Solok	3 (Hukum)
Kota Bukittinggi	2 (Hukum)
Kota Padang	2 (Pertanian)
Kota Padang Panjang	2 (Administrasi Bisnis)
Kota Payakumbuh	3 (Teknik)
Kabupaten Kampar	3 (Hukum)
Kabupaten Kerinci	4 (Ilmu Pendidikan)
Kabupaten Sarolangun	2 (Hukum)
Kabupaten Lahat	3 (Ekonomi)
Kota Lubuklinggau	4 (Manajemen)
Kabupaten Muara Enim	3 (Hukum)
Kota Palembang	2 (Ilmu Sosial)
Kabupaten Merangin	4 (Ilmu Pemerintahan)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4 (Sosiologi)
Kota Jambi	4 (Ekonomi)
Kabupaten Bandung	3 (Ilmu Politik)
Kabupaten Bandung Barat	3 (Ilmu Pemerintahan)
Kabupaten Cianjur	4 (Ilmu Administrasi)
Kabupaten Purwakarta	2 (Ilmu Ekonomi)
Kabupaten Subang	2 (Ekonomi)
Kabupaten Sukabumi	3 (Manajemen)
Kota Bekasi	4 (Ilmu Sosial)
Kota Depok	3 (Tsaqofah Islamiyyah)
Kota Serang	2 (Ilmu Sosial)
Kabupaten Brebes	2 (Ekonomi)

Kabupaten Cilacap	1 (SMA)
Kabupaten Purworejo	3 (Hukum)
Kabupaten Wonosobo	3 (Hukum)
Kota Magelang	2 (Teknik)
Kota Pekalongan	2 (Hukum)
Kota Salatiga	3 (Manajemen)
Kota Semarang	3 (Manajemen)
Kota Surakarta	1 (SMA)
Kota Tegal	3 (Manajemen)
Kabupaten Bantul	3 (Humaniora)
Kabupaten Gunung Kidul	2 (Sosiologi)
Kabupaten Kulon Progo	4 (Ilmu Pemerintahan)
Kabupaten Sleman	4 (Studi Islam)
Kota Yogyakarta	4 (Ilmu sosial dan Politik)
Kabupaten Gresik	4 (Sains)
Kabupaten Sidoarjo	3 (Humaniora)
Kota Blitar	3 (Hukum)
Kota Kediri	2 (Ekonomi)
Kota Madiun	2 (Hukum)
Kota Malang	4 (Pendidikan Agama Islam)
Kota Surabaya	4 (Manajemen)
Kota Tangerang	3 (Kesehatan Masyarakat)
Kabupaten Bangli	3 (Humaniora)
Kabupaten Lombok Timur	2 (Hukum)
Kota Mataram	1 (SMA)
Kabupaten Landak	3 (Hukum)
Kabupaten Seruyan	3 (Hukum)
Kabupaten Tapin	4 (Manajemen)
Kabupaten Paser	4 (Sains)
Kota Bitung	2 (Ekonomi)
Kabupaten Alor	3 (Ilmu Administrasi)
Kabupaten Flores Timur	2 (Teknik)
Kota Kupang	4 (Manajemen)
Kabupaten Mempawah	4 (Manajemen)
Kota Pontianak	3 (Teknik Sipil)
Kota Singkawang	2 (Ekonomi)
Kabupaten Barito Timur	2 (Hukum)
Kabupaten Kapuas	3 (Teknik)
Kota Palangka Raya	2 (Ilmu Sosial)
Kabupaten Banjar	1 (SMA)
Kota Balikpapan	2 (Ekonomi)
Kota Bontang	4 (Spesialis Bedah Orthopaedi)
Kota Samarinda	3 (Sains)
Kabupaten Nunukan	2 (Ekonomi)

Kota Tarakan	4 (Kesehatan Masyarakat)
Kota Manado	4 (Sains dan Teknologi)
Kota Tomohon	2 (Ekonomi)
Kabupaten Bone	3 (Sains)
Kabupaten Sinjai	2 (Ilmu Sosial)
Kota Makassar	4 (Teknik Sipil)
Kota Parepare	4 (Hukum)
Kabupaten Halmahera Tengah	4 (Teknik Sipil)
Kabupaten Kepulauan Sula	1 (SMA)
Kabupaten Pulau Taliabu	1 (SMA)
Kota Ternate	4 (Manajemen)
Kota Tidore Kepulauan	1 (SMA)
Kabupaten Asmat	2 (Ilmu Sosial)
Kabupaten Merauke	2 (Ekonomi)
Kota Jayapura	3 (Manajemen)
Kabupaten Fakfak	1 (SMA)
Kabupaten Raja Ampat	2 (Ekonomi)
Kota Sorong	4 (Manajemen)



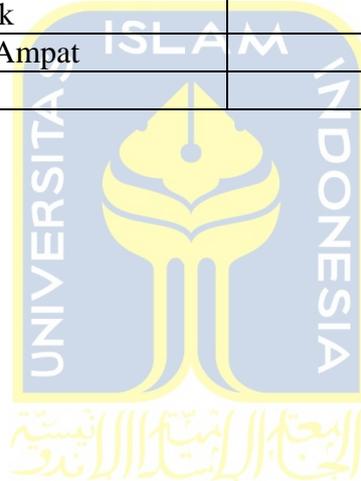
### LAMPIRAN 3

#### Data Aparatur Sipil Negara (ASN)

<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>Jumlah ASN</b>
Kota Banda Aceh	4380
Kota Sabang	2714
Kabupaten Aceh Jaya	3125
Kabupaten Aceh Utara	2974
Kabupaten Aceh Singkil	3516
Kota Lhokseumawe	4319
Kota Langsa	4956
Kabupaten Labuhan Batu	5649
Kabupaten Nias	2874
Kota Medan	14760
Kota Sibolga	2579
Kota Binjai	4753
Kota Pematang Siantar	4811
Kota Solok	2177
Kota Bukittinggi	2795
Kota Padang	9727
Kota Padang Panjang	2060
Kota Payakumbuh	3177
Kabupaten Kampar	9556
Kabupaten Kerinci	5016
Kabupaten Sarolangun	4735
Kabupaten Lahat	5835
Kota Lubuklinggau	4081
Kabupaten Muara Enim	7683
Kota Palembang	11999
Kabupaten Merangin	6163
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4201
Kota Jambi	6656
Kabupaten Bandung	20581
Kabupaten Bandung Barat	17748
Kabupaten Cianjur	12361
Kabupaten Purwakarta	8101
Kabupaten Subang	13466
Kabupaten Sukabumi	12843
Kota Bekasi	12376
Kota Depok	7847
Kota Serang	4327
Kabupaten Brebes	10770

Kabupaten Cilacap	11898
Kabupaten Purworejo	8866
Kabupaten Wonosobo	7202
Kota Magelang	3066
Kota Pekalongan	3235
Kota Salatiga	3532
Kota Semarang	11416
Kota Surakarta	6601
Kota Tegal	3717
Kabupaten Bantul	8584
Kabupaten Gunung Kidul	8890
Kabupaten Kulon Progo	2824
Kabupaten Sleman	1515
Kota Yogyakarta	5564
Kabupaten Gresik	8061
Kabupaten Sidoarjo	12720
Kota Blitar	3112
Kota Kediri	5253
Kota Madiun	3678
Kota Malang	7986
Kota Surabaya	15205
Kota Tangerang	8460
Kabupaten Bangli	5841
Kabupaten Lombok Timur	10947
Kota Mataram	5380
Kabupaten Landak	4827
Kabupaten Seruyan	3078
Kabupaten Tapin	4841
Kabupaten Paser	2398
Kota Bitung	3186
Kabupaten Alor	4299
Kabupaten Flores Timur	4435
Kota Kupang	4528
Kabupaten Mempawah	4121
Kota Pontianak	5398
Kota Singkawang	3587
Kabupaten Barito Timur	525
Kabupaten Kapuas	6378
Kota Palangka Raya	5091
Kabupaten Banjar	7695
Kota Balikpapan	6367
Kota Bontang	5158
Kota Samarinda	8184
Kabupaten Nunukan	3985

Kota Tarakan	3362
Kota Manado	5876
Kota Tomohon	2724
Kabupaten Bone	9311
Kabupaten Sinjai	4906
Kota Makassar	11449
Kota Parepare	4654
Kabupaten Halmahera Tengah	2473
Kabupaten Kepulauan Sula	3160
Kabupaten Pulau Taliabu	974
Kota Ternate	4838
Kota Tidore Kepulauan	3836
Kabupaten Asmat	2604
Kabupaten Merauke	6091
Kota Jayapura	5523
Kabupaten Fakfak	4039
Kabupaten Raja Ampat	2689
Kota Sorong	3874



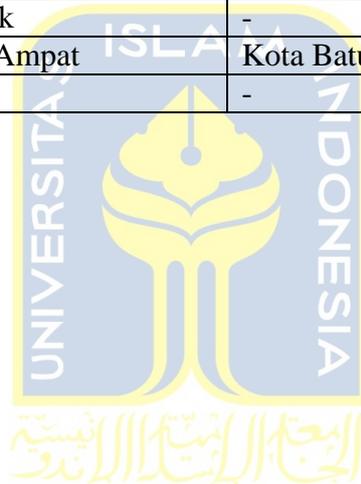
## LAMPIRAN 4

### Data Studi Banding

<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>Studi Banding</b>
Kota Banda Aceh	Kota Denpasar
Kota Sabang	Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten Aceh Timur
Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Situbondo
Kabupaten Aceh Singkil	Kota Aceh
Kota Lhokseumawe	Medan
Kota Langsa	-
Kabupaten Labuhan Batu	Kota Salatiga
Kabupaten Nias	-
Kota Medan	Kabupaten Gianyar
Kota Sibolga	-
Kota Binjai	Kota Makassar
Kota Pematang Siantar	-
Kota Solok	Kota Depok
Kota Bukittinggi	Kota Yogyakarta
Kota Padang	Kota Makassar
Kota Padang Panjang	-
Kota Payakumbuh	Kota Malang
Kabupaten Kampar	Kabupaten Kendal
Kabupaten Kerinci	Jakarta
Kabupaten Sarolangun	Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Lahat	-
Kota Lubuklinggau	-
Kabupaten Muara Enim	Kota Surabaya
Kota Palembang	Kabupaten Bangka
Kabupaten Merangin	-
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kota Jambi
Kota Jambi	Kota Yogyakarta
Kabupaten Bandung	Kabupaten Wonosobo
Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Cianjur	-
Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Bogor
Kabupaten Subang	Kabupaten Sleman
Kabupaten Sukabumi	-
Kota Bekasi	Kota Surabaya
Kota Depok	-
Kota Serang	Kabupaten Malang
Kabupaten Brebes	Kabupaten Bantul

Kabupaten Cilacap	Kabupaten Purbalingga
Kabupaten Purworejo	Kabupaten Bojonegoro
Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Tanggamus
Kota Magelang	Kabupaten Minahasa
Kota Pekalongan	Kabupaten Gunung Kidul
Kota Salatiga	-
Kota Semarang	Kabupaten Konowe Selatan
Kota Surakarta	Kota Yogyakarta
Kota Tegal	Kota Tarakan
Kabupaten Bantul	-
Kabupaten Gunung Kidul	Kota Surabaya
Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Cilacap
Kabupaten Sleman	Kabupaten Bojonegoro
Kota Yogyakarta	Jakarta
Kabupaten Gresik	-
Kabupaten Sidoarjo	-
Kota Blitar	-
Kota Kediri	Kota Palangka Raya
Kota Madiun	-
Kota Malang	-
Kota Surabaya	-
Kota Tangerang	-
Kabupaten Bangli	Kota Bima
Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Buleleng
Kota Mataram	Kota Yogyakarta
Kabupaten Landak	Kota Palangka Raya
Kabupaten Seruyan	Kota Bandung
Kabupaten Tapin	Kota Semarang
Kabupaten Paser	-
Kota Bitung	Kota Gorontalo
Kabupaten Alor	-
Kabupaten Flores Timur	Kota Mataram
Kota Kupang	Kota Surabaya
Kabupaten Mempawah	Kabupaten Banyuwangi
Kota Pontianak	Jawa Timur
Kota Singkawang	Kota Pontianak
Kabupaten Barito Timur	Kota Malang
Kabupaten Kapuas	Kota Malang
Kota Palangka Raya	Kota Malang
Kabupaten Banjar	Kota Bekasi
Kota Balikpapan	Kota Surakarta
Kota Bontang	Kabupaten Pangkajene
Kota Samarinda	Kota Bontang
Kabupaten Nunukan	Kabupaten Tabanan

Kota Tarakan	Kota Tangerang
Kota Manado	-
Kota Tomohon	Kota Malang
Kabupaten Bone	Bantul
Kabupaten Sinjai	Kabupaten Blitar
Kota Makassar	Kota Surabaya
Kota Parepare	Kota Bandung
Kabupaten Halmahera Tengah	Kota Palangka Raya
Kabupaten Kepulauan Sula	-
Kabupaten Pulau Taliabu	-
Kota Ternate	Kabupaten Gorontalo
Kota Tidore Kepulauan	-
Kabupaten Asmat	-
Kabupaten Merauke	Kabupaten Lampung Utara
Kota Jayapura	Kota Pontianak
Kabupaten Fakfak	-
Kabupaten Raja Ampat	Kota Batu
Kota Sorong	-



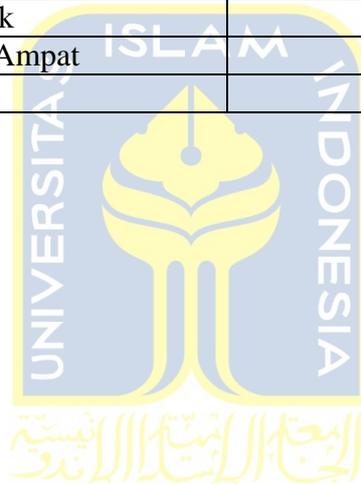
## LAMPIRAN 5

### Data Tingkat Urbanisasi

Kota/Kabupaten	Tingkat Urbanisasi
Kota Banda Aceh	4641
Kota Sabang	279
Kabupaten Aceh Jaya	23
Kabupaten Aceh Utara	224
Kabupaten Aceh Singkil	64
Kota Lhokseumawe	1301
Kota Langsa	845
Kabupaten Labuhan Batu	222
Kabupaten Nias	78
Kota Medan	8481
Kota Sibolga	2109
Kota Binjai	4578
Kota Pematang Siantar	4519
Kota Solok	99
Kota Bukittinggi	4400
Kota Padang	1151
Kota Padang Panjang	2285
Kota Payakumbuh	1266
Kabupaten Kampar	67
Kabupaten Kerinci	70,57
Kabupaten Sarolangun	40
Kabupaten Lahat	93,43
Kota Lubuklinggau	618,35
Kabupaten Muara Enim	89,66
Kota Palembang	3351
Kabupaten Merangin	49,21
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	69,36
Kota Jambi	2877,5
Kabupaten Bandung	2309,2
Kabupaten Bandung Barat	1157
Kabupaten Cianjur	565
Kabupaten Purwakarta	1032
Kabupaten Subang	774
Kabupaten Sukabumi	589
Kota Bekasi	9471
Kota Depok	6865
Kota Serang	2299
Kabupaten Brebes	1083

Kabupaten Cilacap	800
Kabupaten Purworejo	691
Kabupaten Wonosobo	796
Kota Magelang	6704
Kota Pekalongan	6714
Kota Salatiga	3567
Kota Semarang	4704
Kota Surakarta	11722
Kota Tegal	7193
Kabupaten Bantul	1940,5
Kabupaten Gunung Kidul	556,89
Kabupaten Kulon Progo	710,74
Kabupaten Sleman	2053,7
Kota Yogyakarta	13340
Kabupaten Gresik	1079
Kabupaten Sidoarjo	3442
Kota Blitar	4298
Kota Kediri	4480
Kota Madiun	5192
Kota Malang	5929
Kota Surabaya	8201
Kota Tangerang	8187
Kabupaten Bangli	540
Kabupaten Lombok Timur	737
Kota Mataram	7345
Kabupaten Landak	37
Kabupaten Seruyan	12
Kabupaten Tapin	81
Kabupaten Paser	33,93
Kota Bitung	539
Kabupaten Alor	69,78
Kabupaten Flores Timur	143
Kota Kupang	2289
Kabupaten Mempawah	202
Kota Pontianak	5727,9
Kota Singkawang	419,7
Kabupaten Barito Timur	31
Kabupaten Kapuas	24
Kota Palangka Raya	115
Kabupaten Banjar	114
Kota Balikpapan	1328
Kota Bontang	401,59
Kota Samarinda	1037,8
Kabupaten Nunukan	13,97

Kota Tarakan	1008,9
Kota Manado	2580
Kota Tomohon	706
Kabupaten Bone	166,58
Kabupaten Sinjai	290
Kota Makassar	8246
Kota Parepare	1396
Kabupaten Halmahera Tengah	33,75
Kabupaten Kepulauan Sula	55
Kabupaten Pulau Taliabu	17
Kota Ternate	1748,6
Kota Tidore Kepulauan	455,09
Kabupaten Asmat	2,99
Kabupaten Merauke	4,82
Kota Jayapura	210
Kabupaten Fakfak	5,31
Kabupaten Raja Ampat	5,89
Kota Sorong	365,22



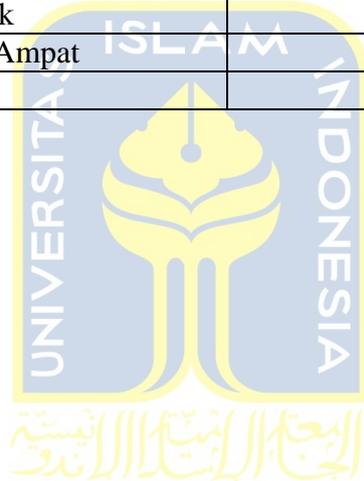
## LAMPIRAN 6

### Data Jumlah Anggota DPRD

<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>Jumlah Anggota DPRD</b>
Kota Banda Aceh	30
Kota Sabang	20
Kabupaten Aceh Jaya	20
Kabupaten Aceh Utara	45
Kabupaten Aceh Singkil	25
Kota Lhokseumawe	25
Kota Langsa	25
Kabupaten Labuhan Batu	45
Kabupaten Nias	25
Kota Medan	50
Kota Sibolga	20
Kota Binjai	30
Kota Pematang Siantar	30
Kota Solok	35
Kota Bukittinggi	25
Kota Padang	45
Kota Padang Panjang	20
Kota Payakumbuh	25
Kabupaten Kampar	45
Kabupaten Kerinci	30
Kabupaten Sarolangun	35
Kabupaten Lahat	40
Kota Lubuklinggau	30
Kabupaten Muara Enim	45
Kota Palembang	50
Kabupaten Merangin	35
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	35
Kota Jambi	45
Kabupaten Bandung	50
Kabupaten Bandung Barat	50
Kabupaten Cianjur	50
Kabupaten Purwakarta	45
Kabupaten Subang	50
Kabupaten Sukabumi	50
Kota Bekasi	50
Kota Depok	25
Kota Serang	45
Kabupaten Brebes	50

Kabupaten Cilacap	50
Kabupaten Purworejo	45
Kabupaten Wonosobo	41
Kota Magelang	25
Kota Pekalongan	35
Kota Salatiga	25
Kota Semarang	50
Kota Surakarta	45
Kota Tegal	30
Kabupaten Bantul	45
Kabupaten Gunung Kidul	44
Kabupaten Kulon Progo	40
Kabupaten Sleman	50
Kota Yogyakarta	30
Kabupaten Gresik	50
Kabupaten Sidoarjo	50
Kota Blitar	50
Kota Kediri	50
Kota Madiun	45
Kota Malang	45
Kota Surabaya	50
Kota Tangerang	50
Kabupaten Bangli	30
Kabupaten Lombok Timur	50
Kota Mataram	40
Kabupaten Landak	35
Kabupaten Seruyan	25
Kabupaten Tapin	25
Kabupaten Paser	30
Kota Bitung	30
Kabupaten Alor	30
Kabupaten Flores Timur	30
Kota Kupang	35
Kabupaten Mempawah	30
Kota Pontianak	45
Kota Singkawang	30
Kabupaten Barito Timur	25
Kabupaten Kapuas	40
Kota Palangka Raya	30
Kabupaten Banjar	45
Kota Balikpapan	45
Kota Bontang	25
Kota Samarinda	45
Kabupaten Nunukan	25

Kota Tarakan	25
Kota Manado	40
Kota Tomohon	20
Kabupaten Bone	45
Kabupaten Sinjai	30
Kota Makassar	50
Kota Parepare	25
Kabupaten Halmahera Tengah	30
Kabupaten Kepulauan Sula	25
Kabupaten Pulau Taliabu	18
Kota Ternate	30
Kota Tidore Kepulauan	25
Kabupaten Asmat	20
Kabupaten Merauke	30
Kota Jayapura	40
Kabupaten Fakfak	20
Kabupaten Raja Ampat	20
Kota Sorong	30



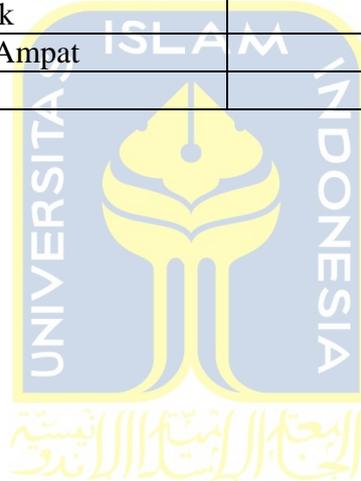
## LAMPIRAN 7

### *Data Intergovernmental Revenue*

<b>Kota/Kabupaten</b>	<b><i>Intergovernmental Revenue</i></b>
Kota Banda Aceh	0,483
Kota Sabang	0,540
Kabupaten Aceh Jaya	0,439
Kabupaten Aceh Utara	0,313
Kabupaten Aceh Singkil	0,507
Kota Lhokseumawe	0,530
Kota Langsa	0,457
Kabupaten Labuhan Batu	0,555
Kabupaten Nias	0,539
Kota Medan	0,306
Kota Sibolga	0,674
Kota Binjai	0,658
Kota Pematang Siantar	0,642
Kota Solok	1,129
Kota Bukittinggi	0,653
Kota Padang	0,547
Kota Padang Panjang	0,646
Kota Payakumbuh	0,608
Kabupaten Kampar	0,354
Kabupaten Kerinci	0,518
Kabupaten Sarolangun	0,506
Kabupaten Lahat	0,404
Kota Lubuklinggau	0,554
Kabupaten Muara Enim	0,301
Kota Palembang	0,410
Kabupaten Merangin	0,556
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0,457
Kota Jambi	0,498
Kabupaten Bandung	0,462
Kabupaten Bandung Barat	0,471
Kabupaten Cianjur	0,492
Kabupaten Purwakarta	0,357
Kabupaten Subang	0,512
Kabupaten Sukabumi	0,492
Kota Bekasi	0,282
Kota Depok	0,379
Kota Serang	0,586
Kabupaten Brebes	0,502

Kabupaten Cilacap	0,521
Kabupaten Purworejo	0,490
Kabupaten Wonosobo	0,484
Kota Magelang	1,229
Kota Pekalongan	0,985
Kota Salatiga	0,562
Kota Semarang	0,348
Kota Surakarta	0,484
Kota Tegal	0,207
Kabupaten Bantul	0,516
Kabupaten Gunung Kidul	0,563
Kabupaten Kulon Progo	0,512
Kabupaten Sleman	0,425
Kota Yogyakarta	0,444
Kabupaten Gresik	0,315
Kabupaten Sidoarjo	0,341
Kota Blitar	0,550
Kota Kediri	0,556
Kota Madiun	0,572
Kota Malang	0,482
Kota Surabaya	0,177
Kota Tangerang	0,273
Kabupaten Bangli	0,552
Kabupaten Lombok Timur	0,490
Kota Mataram	0,499
Kabupaten Landak	0,542
Kabupaten Seruyan	0,062
Kabupaten Tapin	0,445
Kabupaten Paser	0,251
Kota Bitung	0,614
Kabupaten Alor	0,594
Kabupaten Flores Timur	0,571
Kota Kupang	0,605
Kabupaten Mempawah	0,609
Kota Pontianak	0,466
Kota Singkawang	0,615
Kabupaten Barito Timur	0,549
Kabupaten Kapuas	0,536
Kota Palangka Raya	0,604
Kabupaten Banjar	0,445
Kota Balikpapan	0,208
Kota Bontang	0,224
Kota Samarinda	0,283
Kabupaten Nunukan	0,321

Kota Tarakan	0,342
Kota Manado	0,502
Kota Tomohon	0,656
Kabupaten Bone	0,511
Kabupaten Sinjai	0,577
Kota Makassar	0,390
Kota Parepare	0,464
Kabupaten Halmahera Tengah	0,661
Kabupaten Kepulauan Sula	0,622
Kabupaten Pulau Taliabu	0,643
Kota Ternate	0,656
Kota Tidore Kepulauan	0,734
Kabupaten Asmat	0,603
Kabupaten Merauke	0,603
Kota Jayapura	0,508
Kabupaten Fakfak	0,566
Kabupaten Raja Ampat	0,499
Kota Sorong	0,505



## LAMPIRAN 8

### Hasil Uji dan Regresi

#### 1. Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendidikan Kepala Daerah	100	1	4	2,78	1,001
Jumlah ASN	100	525	20581	6117,08	3760,253
Studi Banding	100	0	1	,71	,456
Tingkat Urbanisasi	100	2,99	13340,00	2108,7493	2887,60816
Jumlah Anggota DPRD	100	18	50	36,08	10,464
Intergovernmental Revenue	100	,062	1,229	,50485	,166105
Opini BPK	100	0	1	,84	,368
Valid N (listwise)	100				

#### 2. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

**Iteration History<sup>a,b,c</sup>**

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients	
		Constant	
Step 0	1	89,212	1,360
	2	87,943	1,632
	3	87,934	1,658
	4	87,934	1,658

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 87,934

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

**Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>**

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients							
		Constant	ZX1	ZX2	ZX3	ZX4	ZX5	ZX6	
Step 1	1	85,831	1,360	-,015	-,294	,016	,006	,286	-,249
	2	83,212	1,702	-,042	-,545	,030	,026	,537	-,413
	3	83,094	1,782	-,059	-,636	,034	,040	,636	-,459
	4	83,094	1,787	-,061	-,642	,034	,042	,644	-,461
	5	83,094	1,787	-,061	-,642	,034	,042	,644	-,461

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 87,934

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	4,840	6	,564
	Block	4,840	6	,564
	Model	4,840	6	,564

**3. Menguji Kelayakan Model**

**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	3,650	8	,887

**4. Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	83,094 <sup>a</sup>	,047	,081

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

**5. Analisis Regresi Logistik**

**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup> ZX1	-,061	,303	,040	1	,841	,941
ZX2	-,642	,441	2,123	1	,145	,526
ZX3	,034	,281	,014	1	,904	1,034
ZX4	,042	,311	,018	1	,893	1,043
ZX5	,644	,480	1,801	1	,180	1,904
ZX6	-,461	,298	2,402	1	,121	,630
Constant	1,787	,304	34,613	1	,000	5,974

a. Variable(s) entered on step 1: ZX1, ZX2, ZX3, ZX4, ZX5, ZX6.